



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

SEJARAH SMA / SMK

Kelompok Kompetensi B

Profesional :

Pengantar Sejarah Indonesia II

Pedagogik :

Permasalahan Dalam Pembelajaran Sejarah

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL
GURU PEMBELAJAR

Mata Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas (SMA)/
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kelompok Kompetensi B:
Profesional : Pengantar Sejarah Indonesia II
Pedagogik : Permasalahan Dalam Pembelajaran Sejarah

PENYUSUN

Yudi Setianto, M.Pd.
Syachrial Ariffiantono, M.Pd.
Didik Budi Handoko, S.Pd.
Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

Penulis:

1. Yudi Setianto, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081336091997, yudiroyan@gmail.com
2. Syachrial Ariffiantono, M.Pd., PPPPPTK PKn dan IPS, 081334222929, syachrial1998@gmail.com
3. Didik Budi Handoko, S.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 08113778815, didikbh@gmail.com
4. Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum, PPPPTK PKn dan IPS, 08564653357, rifatul.fikriya@yahoo.com

Penelaah:

1. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd, Universitas Negeri Malang, 081334063349, ikasimanuddin@gmail.com
2. Endang Setyoningsih, S.Pd., SMAN 10 Malang, 081334469744
3. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd. M.Hum, Universitas Negeri Malang, 081944858400, deny.yudo.fis@um.ac.id
4. Budi Santoso, S.Pd., 081334732990, SMP Negeri 02 Batu busan_audams@yahoo.co.id

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang PKn dan IPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengkopi sebagian maupun keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

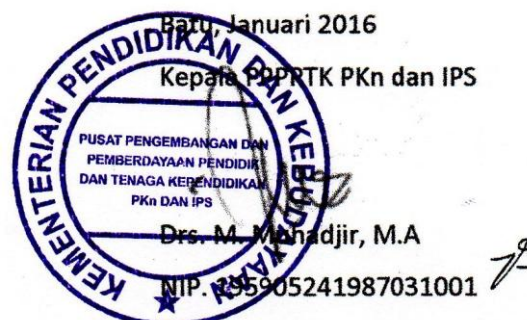
Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS
PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PKn DAN IPS
Drs. M. Manadjir, M.A
NIP. 195905241987031001



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Peta Kompetensi	5
D. Ruang Lingkup	7
E. Saran Penggunaan Modul	8
Profesional : Pengantar Sejarah Indonesia II	9
Kegiatan Pembelajaran 1 Kehidupan Sosial dan Perkembangan kebudayaan Pada Masa Pra Aksara di Indonesia	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	9
C. Uraian Materi	9
D. Aktivitas Pembelajaran	22
E. Latihan / Kasus / Tugas	23
F. Rangkuman	24
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	24
Kegiatan Pembelajaran 2 Penjelajahan Samudera	25
A. Tujuan Pembelajaran	25
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	25
C. Uraian Materi	25
D. Aktivitas Pembelajaran	41
E. Latihan / Kasus / Tugas	42
F. Rangkuman	44
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	44
Kegiatan Pembelajaran 3 Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan	45
A. Tujuan Pembelajaran	45
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	45
C. Uraian Materi	45
D. Aktivitas Pembelajaran	69
E. Latihan / Kasus / Tugas	70
F. Rangkuman	72
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	73
Kegiatan Pembelajaran 4 Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto	74
A. Tujuan Pembelajaran	74
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	74
C. Uraian Materi	74
D. Aktivitas Pembelajaran	99

E. Latihan / Kasus / Tugas	99
F. Rangkuman	100
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	102
Permasalahan Dalam Pembelajaran Sejarah	103
Kegiatan Pembelajaran 5: Penilaian Hasil belajar oleh Pendidik	103
A. Tujuan Pembelajaran	103
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	103
C. Uraian Materi	104
D. Aktivitas Pembelajaran	116
E. Latihan / Kasus / Tugas	117
F. Rangkuman	119
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	120
Kegiatan Pembelajaran 6 Sumber Dan Media Pembelajaran	121
A. Tujuan Pembelajaran	121
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	121
C. Uraian Materi	121
D. Aktivitas Pembelajaran	133
E. Latihan / Kasus / Tugas	134
F. Rangkuman	137
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	139
Daftar Pustaka	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang Lingkup	7
Gambar 2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hasil Pemilu 1955	80
Tabel 1.2. Nilai Ketuntasan dan Keterampilan	116

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan

kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru Sejarah SMA/SMK adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilikdan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya..
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Tujuan

Modul Kompetensi B ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul Kompetensi B. Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru Sejarah SMA/SMK dalam memahami materi Sejarah Sekolah Menengah Atas. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi Sejarah SMA/SMK sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji materi yang terdiri atas materi profesional dan materi pedagogik. Materi profesional terkait dengan materi sejarah, sesuai periodisasi dalam sejarah, sehingga materi ini mencakup Kehidupan Sosial dan Perkembangan Kebudayaan Batu dan Logam pada Masa Praaksara di Indonesia, Penjelajahan Samudera, Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan, serta Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran sejarah, meliputi Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran Sejarah, Sumber dan Media Pembelajaran.

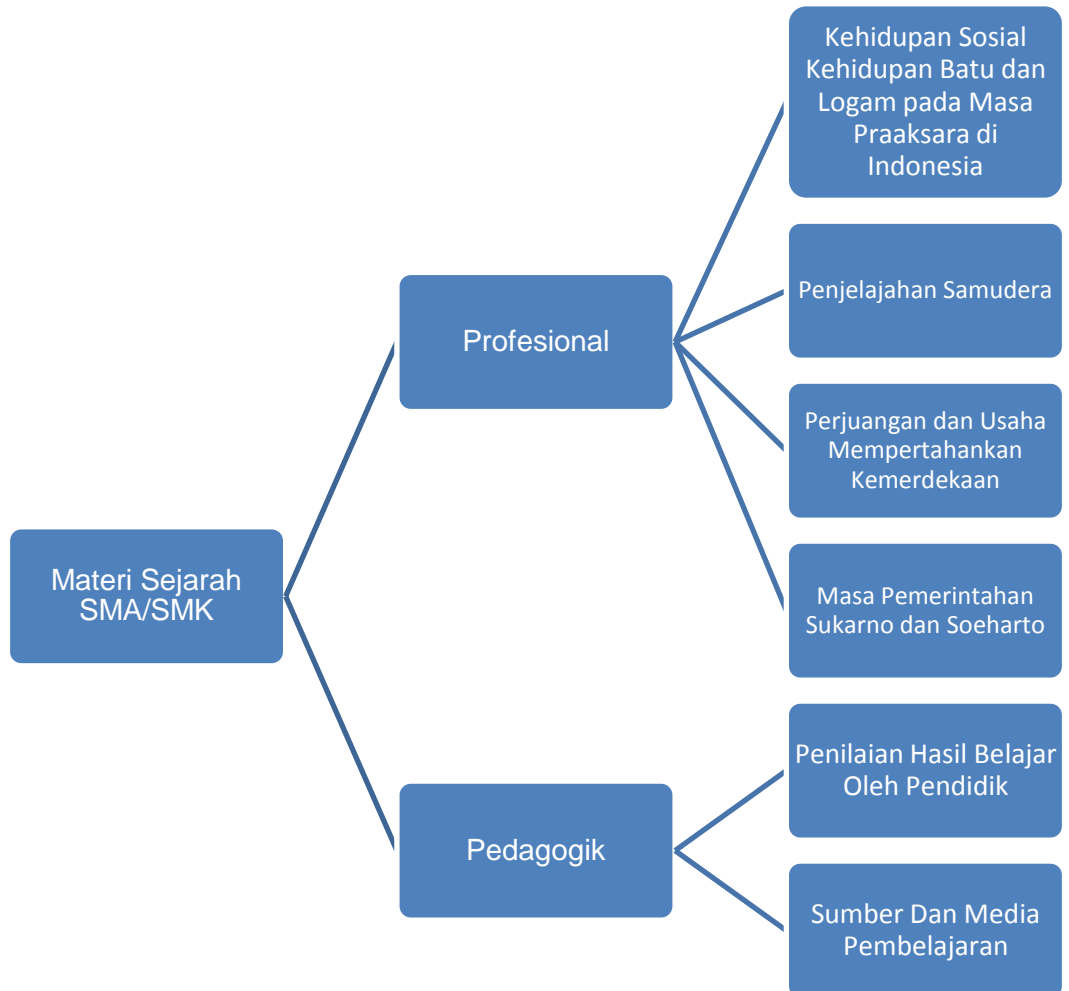
C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Kehidupan Sosial dan Perkembangan Kebudayaan Batu dan Logam pada Masa Praaksara di Indonesia	Memahami kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia dengan baik.
2.	Penjelajahan Samudera	Menganalisis timbulnya penjelajahan samudera hingga terbentuknya Imperialisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia dengan baik.
3.	Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan	Menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI
4.	Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto	Menunjukkan sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa Sukarno serta perkembangan pemerintahan Orde Baru, tumbangnya Orde Baru dengan baik.
5.	Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik	Memahami penilaian autentik sesuai dengan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
		pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan mengaplikasikan pada pembelajaran sejarah
6.	Sumber Dan Media Pembelajaran	Memahami konsep sumber dan media pembelajaran dengan baik.

D. Ruang Lingkup



Gambar 1 Ruang Lingkup

E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran sejarah di SMA/SMK
- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

**KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN
KEBUDAYAAN PADA MASA PRAAKSARA
DI INDONESIA**

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat dapat memahami kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan pada masa Pra-aksara di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjabarkan munculnya kehidupan sosial masyarakat Pra-aksara Indonesia
2. Menjabarkan perkembangan kebudayaan batu pada masa Pra-aksara di Indonesia
3. Menjabarkan perkembangan kebudayaan logam pada masa Pra-aksara di Indonesia

C. URAIAN MATERI

Masa Pra-aksara adalah periode ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan tidak adanya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Periode ini ditandai dengan cara hidup berburu dan mengambil bahan makanan yang tersedia di alam. Pada masa Pra-aksara pola hidup dan berpikir manusia sangat bergantung dengan alam. Tempat tinggal mereka berpindah-pindah berdasarkan ketersediaan sumber makanan.

1. Kehidupan Sosial Masyarakat Praaksara

a. Pola Hunian

Manusia mengenal tempat tinggal atau menetap semenjak masa Mesolithikum (batu tengah) atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Sebelumnya manusia belum mengenal tempat tinggal dan hidup *nomaden* (berpindah-pindah). Setelah mengenal tempat tinggal, manusia mulai bercocok tanam dengan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang

binatang ataupun kayu. Pada dasarnya pola hidup pada masa Pra-aksara terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Nomaden

Nomaden adalah pola hidup dimana manusia purba pada saat itu hidup berpindah-pindah atau menjelajah. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Mata pencahariannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam (*Food Gathering*)

2) Sedenter

Sedenter adalah pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan di mana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Mata pencahariannya bercocok tanam serta sudah mulai mengenal norma dan adat yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan

Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter khas, yaitu :

1) Kedekatan dengan sumber air

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup terutama manusia. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Air memberikan kesuburan pada tanaman.

2) Kehidupan di alam terbuka

Manusia purba mempunyai kecenderungan hidup untuk menghuni sekitar aliran sungai. Mereka beristirahat misalnya di bawah pohon besar dan juga membuat atap dan sekat tempat istirahat itu dari daun-daun. Kehidupan di sekitar sungai itu menunjukkan pola hidup manusia purba di alam terbuka. Manusia purba juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia, termasuk tinggal di gua-gua. Mobilitas manusia purba yang tinggi tidak memungkinkan untuk menghuni gua secara menetap. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan bahan makanan mungkin saja dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara.

Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situsnya serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran sungai bengawan solo (sangiran, sambung macan, trinil, ngawi, dan Ngandong, merupakan contoh dari adanya kecenderungan hidup di pinggir sungai. Manusia purba pada masa berburu dan

mengumpulkan makanan selalu berpindah-pindah mencari daerah baru yang dapat memberikan makanan yang cukup.

Pada umumnya mereka bergerak tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber air yang lain, karena binatang buruan biasa berkumpul di dekat sumber air. Di tempat-tempat itu kelompok manusia Pra-aksara menantikan binatang buruan mereka. Selain itu, sungai dan danau merupakan sumber makanan, karena terdapat banyak ikan di dalamnya. Lagi pula di sekitar sungai biasanya tanahnya subur dan ditumbuhi tanaman yang buah atau umbinya dapat dimakan

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka telah mulai lebih lama tinggal di suatu tempat. Ada kelompok-kelompok yang bertempat tinggal di pedalaman, ada pula yang tinggal di daerah pantai. Mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, biasanya bertempat tinggal di dalam gua-gua atau ceruk peneduh (*rock shelter*) yang suatu saat akan ditinggalkan apabila sumber makanan di sekitarnya habis.

Pada tahun 1928 sampai 1931, *Von Stein Callenfels* melakukan penelitian di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Di situ ditemukan kebudayaan *abris sous roche*, yaitu merupakan hasil dari kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan adalah ujung panah, *flake*, batu penggiling. Selain itu juga ditemukan alat-alat dari tanduk rusa. Kebudayaan *Abris sous roche* ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong.

Manusia purba yang tinggal di daerah pantai makanan utamanya berupa kerang, siput dan ikan. Bekas tempat tinggal mereka dapat ditemukan kembali, karena dapat dijumpai sejumlah besar sampah kulit-kulit kerang serta alat yang mereka gunakan.

Di sepanjang pantai Sumatra Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan, terdapat tumpukan atau timbunan sampah kulit kerang dan siput yang disebut *kjokkenmoddinger* (*kjokken* = dapur, *modding* = sampah). Tahun 1925 *Von Stein Callenfels* melakukan penelitian di tumpukan sampah itu. Ia menemukan jenis kapak genggam yang disebut *pebble* (Kapak Sumatra). Selain itu, ditemukan juga berupa anak panah atau mata tombak yang digunakan untuk menangkap ikan.

Fungsi gua hunian Pra-aksara dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu.

1) Sebagai tempat tinggal

Gua-gua dan ceruk payung peneduh (*rock shelter*), sering digunakan manusia sebagai tempat berlindung dari gangguan iklim, cuaca (angin, hujan dan panas), dan juga gangguan dari serangan binatang buas atau kelompok manusia yang lain. Pada periode penghunian gua, yang paling awal tampak adalah gua digunakan sebagai tempat tinggal (hunian), kemudian kurun waktu berikutnya dijadikan tempat kuburan dan kegiatan spiritual lainnya. Pada awal-awal penghunian, tempat hunian menyatu dengan tempat kuburan. Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin bertambahnya jumlah anggota kelompok yang membutuhkan ruangan yang lebih luas, maka mendorong manusia untuk mencari tempat tinggal yang baru. Seiring perkembangan wawasan dan pengetahuan, manusia kemudian memisahkan tempat hunian dan kuburan.

2) Sebagai kuburan

Selain sebagai tempat tinggal, gua hunian juga berfungsi sebagai kuburan. Posisi penguburan dalam gua biasanya dalam keadaan terlipat, yang menurut pendapat para ahli merupakan posisi pada waktu bayi dalam posisi di dalam rahim ibunya. Penguburan manusia dalam gua pada awalnya sangat sederhana sekali, berupa penguburan langsung (*primair burial*), dengan posisi mayat terlentang atau terlipat, ditaburi dengan warna merah (*oker*). Bukti penguburan tertua dalam gua dapat ditemukan pada situs Gua Lawa di Sampung, Jawa Timur.

Pola penguburan dalam gua secara umum dapat dibagi menjadi penguburan langsung (*primair burial*) dan penguburan tidak langsung (*second burial*), baik yang menggunakan wadah ataupun yang tidak menggunakan wadah. Wadah yang biasa digunakan adalah tempayan keramik (guci), gerabah, ataupun peti kayu dalam berbagai ukuran. Posisi mayat yang paling sering ditemukan adalah lurus, bisa telentang, miring dengan berbagai posisi dengan tangan terlipat atau lurus. Posisi lainnya adalah posisi terlipat dengan lutut menekuk di bawah dagu dan tangan melipat di bagian leher atau kepala. Dalam periode penghunian gua, kegiatan penguburan merupakan salah satu kegiatan manusia yang dianggap penting. Awalnya penguburan dilakukan dalam gua yang sama dengan tempat hunian, yaitu di tempat yang agak dalam dan gelap.

Namun seiring perkembangan jumlah anggota dan wawasan pengetahuan, maka manusia mencari lokasi khusus yang digunakan sebagai lokasi kuburan yang terpisah dari lokasi hunian. Oleh karena itu ditemukan adanya gua-gua yang khusus berisi aktivitas sisa-sisa penguburan saja.

3) Sebagai lokasi kegiatan industri alat batu

Selain sebagai tempat hunian dan kuburan, fungsi yang lainnya adalah sebagai tempat lokasi kegiatan alat-alat batu atau perbengkelan. Banyak situs gua-gua Pra-aksara yang ditemukan adanya alat-alat batu dan sisa-sisa pembuatannya. Dalam hal ini bekas-bekas pengerjaan yang masih tersisa berupa serpihan batu yang merupakan pecahan batu inti sebagai bahan dasar alat batu. Situs perbengkelan ini banyak terdapat di pegunungan Seribu Jawa (daerah Pacitan), dan juga di Sulawesi Selatan. Salah satu situs yang banyak tinggalan sisa alat batu adalah situs yang terdapat di Punung (Pacitan) yang merupakan sentra pembuatan kapak perimbas yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *chopper choppingtool* kompleks.

b. Mengenal Api

Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba yang secara tidak sengaja mereka melihat petir yaitu cahaya panas di langit yang menyambar pohon-pohon di sekitarnya, sehingga api itu pun muncul membakar pohon-pohon itu.

Dalam menemukan api, manusia purba membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses tersebut dikenal dengan *trial and error*, yaitu seseorang yang mencoba sesuatu tanpa tahu petunjuk atau cara kerjanya sehingga banyak mengalami kegagalan dan mereka akan terus mencoba walaupun gagal sampai mereka menemukan hasil yang mereka inginkan.

Setelah mengalami banyak kegaglan, akhirnya cara membuat apipun ditemukan. Caranya dengan membenturkan dua buah batu atau dengan menggesekan dua buah kayu, sehingga akan menimbulkan percikan api yang kemudian bisa kita gunakan pada ranting atau daun kering yang kemudian bisa menjadi sebuah api.

Api memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu.

Selain itu api juga berfungsi untuk menghangat badan, sumber penerangan, dan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang.

Melalui pembakaran juga manusia dapat menaklukan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan cara menebang lalu membakar dikenal dengan nama *slash and burn*. Ini adalah kebiasaan pada masa kuno yang berkembang sampai sekarang.

c. Konsep Berburu-Meramu sampai Bercocok Tanam

Pada umumnya mereka masih bergantung pada alam. Untuk bertahan hidup, mereka menerapkan pola hidup *nomaden* atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Alat-alat yang dibuat terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada masa *Meganthropus* dan *Pithecanthropus*. Tempat-tempat yang dituju komunitas ini umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya termasuk pantai

Masa manusia purba berburu dan meramu sering disebut dengan masa *food gathering*. Mereka hanya bisa mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara., misalnya di gua-gua, atau di tepi pantai.

Peralihan zaman Mesolithikum ke Neolithikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari *food gathering* menuju *food producing* dengan *Homo Sapien* sebagai pendukungnya. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Mulanya, mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Hal itulah yang kemudian mendorong manusia purba untuk bercocok tanam.

Kegiatan manusia purba bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini berkembang karena saat itu, yakni sekitar tahun 2000 – 1500 SM ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunnan ke Kepulauan Indonesia.

Seiring kedatangan orang-orang dari Yunnan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita itu, maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai

dikenal. Dalam waktu singkat kegiatan perdangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai bertempat tinggal menetap.

d. Sistem Kepercayaan

Seiring dengan perkembangan kemampuan berfikir, manusia purba mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Untuk menjalankan kepercayaan yang diyakininya manusia purba melakukan berbagai upacara dan ritual. Sistem kepercayaan yang dianut manusia pada masa prakarsa atau masa praaksara antara lain animisme, dinamisme, totemisme, dan shamanisme.

- 1) Animisme, adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu adalah dengan memberikan sesaji.
- 2) Dinamisme, adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang memiliki gaib. Manusia purba melakukannya dengan menyembah batu atau pohon besar, gunung, laut, gua, keris, azimat, dan patung.
- 3) Totemisme, adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual pemujaan manusia purba membutuhkan sarana, dengan membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan ukuran yang besar dan ditujukan untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk upacara. Masa ini disebut sebagai kebudayaan Megalitikum (kebudayaan batu besar).

2. KEBUDAYAAN BATU DAN LOGAM

a. Paleolitik

Kehidupan manusia Pra-aksara masa paleolitik berlangsung sekitar 1,9 juta-10.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti peninggalan masa ini terekam dalam sisa-sisa peralatan yang sering disebut artefak. Di Indonesia tradisi pembuatan alat pada masa Paleolitik dikenal 3 macam bentuk *poko*, yaitu tradisi kapak perimbas-penetak (*chopper chopping-tool complex*), tradisi serpih-bilah (*flake-blade*), dan alat tulang-tanduk (*Ngandong Culture*) (Heekeren 1972).

Tradisi kapak perimbas-penetak yang ditemukan di Indonesia kemudian terkenal dengan nama budaya Pacitan, dan dipandang sebagai tingkat

perkembangan budaya batu yang terawal di Indonesia. Alat budaya Pacitan dapat digolongkan dalam beberapa jenis utama yaitu kapak perimbas (*chopper*), kapak penetak (*chopping-tool*), pahat genggam (*proto hand-adze*), kapak genggam awal (*proto hand-axe*), kapak genggam (*hand-axe*), dan serut genggam (*scraper*).

Tradisi kapak perimbas, di dalam konteks perkembangan alat-alat batu seringkali ditemukan bersama-sama dengan tradisi alat serpih. Bentuk alat serpih tergolong sederhana dengan kerucut pukul (*bulbus*) yang jelas menonjol dan dataran pukul (*striking platform*) yang lebar dan rata.

Seperti diketahui bahwa hakekat data paleolitik di Indonesia kebanyakan ditemukan di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan belum ada yang dapat menjelaskan tentang siapa pendukung dan apa fungsi alat-alat batu itu secara menyakinkan. Meskipun demikian menurut Movius, manusia yang diduga sebagai pencipta dan pendukung alat-alat batu ini adalah manusia *Pithecanthropus*, yang bukti-buktinya ditemukan dalam satu konteks dengan lapisan yang mengandung fosil-fosil *Pithecanthropus pekinensis* di gua Choukou-tien di Cina (Movius 1948:329-340, Soejono 1984).

Bukti peninggalan alat paleolitik menggambarkan bahwa kehidupan manusia pada masa ini sangat bergantung kepada alam lingkungannya. Daerah yang diduduki manusia itu harus dapat memberikan cukup persediaan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*) sesuai dengan batas-batas kemungkinan memperoleh makanan. Suatu upaya penting yang mendominasi aktivitas hidupnya adalah subsistensi. Segala daya manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Manusia masa Paleolitik hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Besarnya kelompok ditentukan oleh besarnya daerah dan hasil perburuan. Jika penduduk suatu daerah melebihi jumlah optimal, maka sebagian dari kelompok ini memisahkan diri dengan cara migrasi ataupun mungkin dilakukan infantisida untuk membatasi besarnya populasi.

Dalam kehidupan masa Paleolitik ini secara tidak langsung terjadi pembagian kerja berdasarkan perbedaan seks atau umur. Kaum lelaki bertugas mencari makan dengan berburu binatang, sedang kaum perempuan tinggal di rumah mengasuh anak sembari meramu makanan. Bahkan setelah

api ditemukan, maka peramu menemukan cara memanasi makanan. Sementara itu pada masa ini belum ditemukan bukti adanya kepercayaan atau religi dari manusia pendukungnya.

b. Mesolitik

Kehidupan manusia Pra-aksara masa mesolitik diperkirakan berlangsung sejak akhir plestosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia yaitu tradisi serpih-bilah (*Toala Culture*), tradisi alat tulang (*Sampung Bone Culture*), dan tradisi kapak genggam Sumatera (*Sumatralith*). Ketiga tradisi alat ini ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali unsur-unsurnya bercampur dengan salah satu jenis alat lebih dominan daripada lainnya.

Tradisi serpih-bilah secara tipologis dapat dibedakan menjadi pisau, serut, lancipan, mata panah, dan mikrolit. Tradisi serpih terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, yang sebagian pada masa tidak lama berselang masih didiami oleh suku bangsa Toala, sehingga dikenal sebagai budaya Toala (Heekeren 1972). Sementara industri tulang Sampung tersebar di situs-situs gua di Jawa Timur. Kelompok budaya ini memperlihatkan dominasi alat tulang berupa sudip dan lancipan. Temuan lain berupa alat-alat batu seperti serpih-bilah, batu pipisan atau batu giling, mata panah, serta sisa-sisa binatang. Sedangkan tradisi *Sumatralith* banyak ditemukan di daerah Sumatera, khususnya pantai timur Sumatera Utara. Situs-situs di daerah ini berupa bukit-bukit kerang.

Bukti peninggalan alat mesolitik menggambarkan bahwa corak kehidupan yang menggantungkan diri kepada alam masih berlanjut. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan masih ditemukan, namun sudah ada upaya pengenalan awal tentang hortikultur yang dilakukan secara berpindah. Masyarakat mulai mengenal pola kehidupan yang berlangsung di gua-gua alam (*abris sous roche*) dan di pantai (*kjokkenmoddinger*) yang tidak jauh dari sumber bahan makanan.

Suatu sistem penguburan di dalam gua (antara lain budaya Sampung) dan bukit Kerang (Sumatera Utara) sebagai bukti awal penguburan manusia di Indonesia, serta lukisan dinding gua dan dinding karang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua) yang merupakan ekspresi rasa estetik dan religius, melengkapi bukti kegiatan manusia pada masa ini. Bahan

zat pewarna merah, hitam, putih, dan kuning digunakan untuk bahan melukis cap-cap tangan, manusia, manusia, binatang, perahu, matahari, dan lambang-lambang.

Arti dan maksud lukisan dinding gua ini masih belum jelas pada umumnya tulisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan dan harapan hidup. Lukisan tersebut bukanlah sekedar dekorasi atau kegemaran seni semata-mata melainkan bermakna lebih mendalam lagi yaitu menyangkut aspek kehidupan berdasarkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di alam sekitarnya. Adanya penguburan dan lukisan dinding gua merupakan bukti berkembangnya corak kepercayaan di kalangan masyarakat Pra-aksara.

c. Neolitik

Masa neolitik merupakan masa yang amat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban. Pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat.

Bukti yang didapat dari masa neolitik terutama berupa berbagai jenis batu yang telah dipersiapkan dengan baik. Kemahiran mengupam alat batu telah melahirkan jenis alat seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, pemukul kulit kayu, gerabah, serta perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang.

Beliung persegi mempunyai bentuk yang bervariasi dan persebaran yang luas terutama di Indonesia bagian barat. Beliung tersebut terbuat dari batu *rijang*, *kalsedon*, *agat*, dan *jaspis*. Sementara kapak lonjong tersebar di Indonesia bagian timur dan diduga lebih tua dari beliung persegi (Heekeren 1972). Gerabah yang merupakan unsur paling banyak ditemukan pada situs-situs neolitik memperlihatkan pembuatan teknik tatap Bentuk gerabah antara lain berupa periuk dan cawan yang memiliki *slip* merah dengan hias gores dan tera bermotifkan garis lurus dan tumpal. Sedangkan alat pemukul kulit kayu banyak ditemukan di Sulawesi dan Kalimantan. Demikian pula mata panah yang sering dihubungkan dengan budaya neolitik, terutama ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi.

Kebudayaan Neolitik yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang tersebar ke Indonesia tidak datang/menyebarkan sendirinya, tetapi terdapat manusia pendukungnya yang berperan aktif dalam rangka

penyebaran kebudayaan tersebut. Manusia pendukung yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan itulah merupakan suatu bangsa yang melakukan perpindahan/imigrasi dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia bahkan masuk ke pulau-pulau yang tersebar di Lautan Pasifik.

Bangsa yang bermigrasi ke Indonesia berasal dari daratan Asia tepatnya Yunan Utara bergerak menuju ke Selatan memasuki daerah Hindia Belakang (Vietnam)/Indochina dan terus ke Kepulauan Indonesia, dan bangsa tersebut adalah:

1. Bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoid yang merupakan rumpun bangsa Melanosoid/Ras Negroid. Bangsa ini merupakan gelombang pertama yang bermigrasi ke Indonesia.
2. Bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa Austronesia yang termasuk golongan Ras Malayan Mongoloid. Bangsa ini melakukan perpindahan ke Indonesia melalui dua gelombang yaitu:
 - a. Gelombang pertama tahun 2000 SM, menyebar dari daratan Asia ke Semenanjung Melayu, Indonesia, Philipina dan Formosa serta Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar yang disebut dengan Proto Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu Barat dan Timur, dan membawa kebudayaan Neolithikum (Batu Muda).
 - b. Gelombang kedua tahun 500 SM, disebut dengan bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia membawa kebudayaan logam (perunggu).

Manusia masa neolitik sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya pada alam, tetapi sudah menguasai alam lingkungan sekitarnya serta aktif membuat perubahan. Masyarakat mulai mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dengan sistem *slash and burn*, atau terjadi perubahan dari *food gathering* ke *food producing*. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dijinakkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu, dan menangkap ikan masih terus dilakukan.

Masyarakat masa neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda cara hidup menetap di suatu tempat, berkelompok membentuk perkampungan-perkampungan kecil. Di masa ini kelompok manusia sudah lebih besar, karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam

jumlah yang lebih besar. Pada masa ini diperkirakan telah muncul bentuk perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan adalah hasil pertanian ataupun kerajinan tangan. Adanya penemuan-penemuan baru ini menyebabkan masa ini oleh v. Gordon Childe (1958) sering disebut sebagai masa Revolusi Neolitik, karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia.

Pengembangan konsep kepercayaan pada masa neolitik mulai memainkan peranan penting. Konsep kepercayaan ini kemudian diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Kegiatan kepercayaan seperti ini dikenal dengan nama tradisi megalitik. R. Von Heine Geldern (1945) menggolongkan tradisi megalitik dalam 2 tradisi, yaitu megalitik tua yang berkembang pada masa neolitik (2500-1500 SM) dan megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik (1000 SM – abad I M). Megalitik tua menghasilkan bangunan yang disusun dari batu besar seperti *menhir*, *dolmen*, undak batu, limas berundak, pelinggih, patung simbolik, tembok batu, dan jalan batu.

d. Paleometalik

Masa paleometalik merupakan masa yang mengandung kompleksitas, baik dari segi materi maupun alam pikiran yang tercermin dari benda buatanya. Perbendaharaan masa paleometalik memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai manusia pada masa itu, terutama kemajuan di bidang teknologi. Dalam masa paleometalik teknologi berkembang lebih pesat sebagai akibat dari tersusunnya golongan-golongan dalam masyarakat yang dibebani pekerjaan tertentu.

Pada masa ini teknologi pembuatan alat jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal tersebut dimulai dengan penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Penemuan logam merupakan bukti kemajuan *pyrotechnology* karena manusia telah mampu menghasilkan temperatur yang tinggi untuk dapat melebur bijih logam.

Atas dasar temuan arkeologis, Indonesia mengenal alat-alat yang dibuat dari perunggu, besi, dan emas. Benda-benda perunggu di Indonesia ditemukan tersebar di bagian barat dan timur. Hasil utama benda perunggu

pada masa paleometalik ini meliputi nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, dan benda perunggu lainnya. Sedangkan benda-benda besi yang ditemukan antara lain mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata tembilang, mata pedang, mata tombak, dan gelang besi. Pada prinsipnya teknik pengerjaan artefak logam ini ada dua macam, yakni teknik tempa dan teknik cetak. Proses pencetakannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung ialah dengan menuang logam yang sudah mencair langsung ke dalam cetakan, dan secara tidak langsung ialah dengan membuat model terlebih dahulu, dari model ini kemudian dibuat cetakannya. Cara yang kedua ini disebut dengan *acire perdue* atau lilin hilang sementara itu tipe-tipe cetakan yang digunakan dapat berupa cetakan tunggal atau cetakan terbuka, cetakan setangkup (*bivalve mould*), dan cetakan ganda (*piece mould*).

Pada masa ini dihasilkan pula gerabah yang menunjukkan perkembangan yang lebih meningkat. Gerabah tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diperlukan dalam upacara penguburan baik sebagai bekal kubur maupun tempayan kubur. Sementara itu benda-benda temuan lainnya berupa perhiasan seperti hiasan dari kulit kerang, tulang, dan manik-manik.

Kemahiran teknik yang dimiliki manusia masa paleometalik ini berhubungan dengan tersusunnya masyarakat yang menjadi makin kompleks, dimana perkampungan sudah lebih besar. Pembagian kerja makin ketat dengan munculnya golongan yang melakukan pekerjaan khusus (*undagi*). Pertanian dengan sistem persawahan mulai dikembangkan dengan menyempurnakan alat pertanian dari logam, pengolahan tanah, dan pengaturan air sawah. Hasil pertanian ini selain disimpan juga diperdagangkan ke tempat lain bersama nekara perunggu, moko, perhiasan, dan sebagainya. Peranan kepercayaan dan upacara-upacara religius sangat penting pada masa paleometalik. Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dilakukan terpimpin, dan ketrampilan dalam pelaksanaannya makin ditingkatkan.

Pada masa ini kehidupan spiritual yang berpusat kepada pemujaan nenek moyang berkembang secara luas. Demikian pula kepada orang yang meninggal diberikan penghormatan melalui upacara penguburan dengan

disertai bekal kubur. Penguburan dapat dilakukan dalam tempayan, tanpa wadah dalam tanah, atau dengan berbagai kubur batu melalui upacara tertentu yang mencapai puncaknya dengan mendirikan bangunan batu besar. Tradisi inilah yang kemudian dikenal sebagai tradisi megalitik muda. Tradisi megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik telah menghasilkan bangunan batu besar berupa peti kubur batu, kubur *dolmen*, *sarkofagus*, *kalamba*, *waruga*, dan batu Kandang. Di tempat kuburan semacam itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan nenek moyang seperti *menhir*, patung nenek moyang, batu saji, lumpang batu, ataupun batu dakon. Pada akhirnya kedua tradisi megalitik tua dan muda tersebut bercampur, tumpang tindih membentuk variasi lokal, bahkan pada perkembangan selanjutnya bercampur dengan unsur budaya Hindu, Islam, dan kolonial.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi kehidupan sosial dan teknologi masyarakat masa Praaksara di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.
2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas.

Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 8 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya setiap kelompok mengerjakan semua tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK 1

Tugas Individu

Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana konsep periodisasi praaksara berdasarkan hasil kebudayaan batu dan logam?
2. Bagaimana corak kehidupan sosial masyarakat praaksara pada masa kebudayaan batu
3. Bagaimana corak kehidupan sosial masyarakat praaksara pada masa kebudayaan logam?
4. Pilih dan deskripsikan salah satu hasil kebudayaan Praaksara pada masa kebudayaan logam,
5. Jelaskan bagaimana perkembangan kehidupan teknologi dikaitkan dengan perkembangan kebudayaan batu dan logam pada masa praaksara di Indonesia

LK2

Tugas Kelompok

1. **Setiap kelompok memilih salah satu benda warisan budaya dari masa Praaksara.**
2. **Berdasarkan karakteristik benda warisan budaya yang dipilih, setiap kelompok mendeskripsikan dan menafsirkan corak kehidupan sosial masyarakat Pra Aksara.**

F. RANGKUMAN

Mencermati perkembangan Pra-Aksara pada umumnya terdapat tiga faktor yang saling berkaitan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan tentang kehidupan manusia masa Pra-Aksara maka perlu mengintegrasikan antara lingkungan alam, tinggalan manusia, dan tinggalan budayanya.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia?
2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia?
3. Apa manfaat materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu di sekolah?
4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

PENJELAJAHAN SAMUDERA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat mampu menganalisis timbulnya penjelajahan samudera hingga terbentuknya Imperialisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong timbulnya penjelajahan samudera
2. Menganalisis hubungan antara penjelajahan samudera dengan timbulnya Imperialisme dan Kolonialisme
3. Menganalisis proses kedatangan bangsa Barat sampai terbentuknya Kolonialisme di Indonesia

C. URAIAN MATERI

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Penjelajahan Samudera

Pada akhir abad ke-15, di Eropa timbul suatu gerakan Renaissance dan Humanisme yang bertujuan untuk mempelajari, menyelidiki dan menggali ilmu pengetahuan bangsa Romawi dan Yunani kuno. Semangat untuk dapat lebih dari masa lampau menimbulkan gerakan kemajuan. Dengan semangat kemajuan tersebut, maka pada abad ke-15 di Eropa melahirkan temuan-temuan baru, misalnya temuan Nicolaus Copernicus bahwa bumi itu bulat. Hal ini mendorong pelaut-pelaut dari Spanyol, Portugis dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudera mencari daerah baru.

Berbagai penyebab terjadinya penjelajahan samudera antara lain:

- a) Jatuhnya Konstantinopel yang berperan sebagai bandar transit ke tangan Turki pada tahun 1453. Dengan begitu, hubungan dagang antara Eropa-Asia terputus. Putusnya hubungan dagang tersebut mendorong orang-orang Portugis untuk mencari jalan sendiri ke daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia

- b) Semangat Perang Salib yang dimiliki orang Portugis. Pada abad ke-15 Islam berkuasa di Semenanjung Andalusia. Pada saat itu terjadi peperangan yang dilakukan kekuasaan Kristen untuk mengusir Islam dan merebut jalur perdagangan dari tangan pedagang Islam serta menaklukkan pusat-pusat perdagangan Islam.
- c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya: ditemukan teori Heliosentris oleh Nicolaus Copernicus yang didukung Galileo Galilei. Penemuan kompas yang dapat digunakan untuk menentukan arah dan posisi laut.
- d) Kisah perjalanan Marcopolo (1254-1324) yaitu seorang pedagang dari Venesia ke Cina yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*Book of Experience*", mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi.
- e) Adanya keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi.
- f) Adanya semboyan Gold, Gospel, dan Glory (mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen).

Untuk mengatasi kemungkinan bersaing antara Portugis dan Spanyol dalam penjelajahan samudera, Paus Alexander VI di Roma pada tahun 1494 memberikan hak kepada kedua negara untuk menjelajahi dunia. Kemudian kedua bangsa mengadakan perjanjian Tordesilas yang menetapkan bahwa garis batas antara kedua daerah kekuasaan Portugis dan Spanyol adalah garis meridian yang melalui Tanjung Verde. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol berkuasa atas daerah sebelah barat Tanjung Verde, sedangkan Portugis di daerah sebelah timur Tanjung Verde. Namun pada tahun 1521 ketika Portugis dan Spanyol sampai di Maluku kedua negara saling menuduh melanggar. Sebab utama perselisihan terkait hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Perselisihan dapat diselesaikan melalui Perjanjian Saragosa tahun 1528, dengan kesepakatan Spanyol menduduki Filipina dan Portugis menduduki Indonesia (Maluku).

2. Timbulnya Kolonialisme dan Imperialisme

Kolonialisme sebenarnya berasal dari nama seorang petani Romawi yang bernama *Colonus*, dalam perjalanannya *Colonus* pergi jauh untuk mencari tanah yang subur untuk dikerjakan dan ditempati. Lama kelamaan tindakan *Colonus*

tersebut diikuti oleh petani yang lain dan mereka bersama-sama menetap di suatu tempat yang bernama *Colonia*. Jadi *Colonia* sendiri dapat diartikan sebagai tanah pemukiman. Didalam lembaran sejarah kita banyak sekali kita temukan serombongan orang yang meninggalkan tempat asalnya untuk mencari suatu daerah baru, misalnya dari Inggris ke Australia, atau dari Cina ke Asia Tenggara. Mereka datang dengan berbagai macam alasan dan tujuan antara lain; karena alasan politik di negerinya, atau karena ingin mencari sumber-sumber bahan perdagangan (logam mulia, rempah-rempah, kayu cendana). Untuk tujuan yang terakhir ini mereka mendirikan kantor perdagangan yang pada akhirnya menjadi pusat koloni untuk menjajah. Jadi secara umum kolonialisme dapat diartikan sebagai suatu sistem pemukiman yang berada di luar negara induk (penjajah).

Sedangkan Imperialisme, berasal bahasa latin *Imperare* atau Imperium yang artinya hak untuk memerintah. Secara umum imperialisme diartikan sebagai usaha untuk memperluas wilayah suatu negara dengan cara merebut dan menanamkan pengaruhnya di daerah lain. Dalam prakteknya antara kolonialisme dan imperialisme sulit dipisahkan.

Latar belakang timbulnya Kolonialisme dan Imperialisme antara lain adalah:

1) Rempah-rempah

Rempah-rempah adalah komoditi yang berharga untuk diperdagangkan. Orang-orang Eropa memerlukannya sebagai bumbu masakan, bahan obat-obatan, atau untuk bahan pengawet makanan. Hal ini memacu hasrat orang-orang Eropa untuk berlomba-lomba menjelajah samudera untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya sehingga lebih murah dan dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Daerah timur (Indonesia) sebagai penghasil rempah-rempah merupakan tujuan utama bangsa-bangsa Eropa Barat (Spanyol, Portugis, dan Belanda).

2) Hubungan antara Eropa dan Asia Barat

Permusuhan antara Eropa Barat (Kristen) dengan Asia Barat (Islam) telah membuka mata bangsa Eropa untuk lebih mengenal daerah timur. Sebelum terjadinya Perang Salib Konstantinopel merupakan pelabuhan transit yang berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Setelah perang salib selesai, bangsa Turki Usmani menguasai pelabuhan tersebut. Dengan dikuasainya

pelabuhan tersebut, maka putuslah hubungan dagang antara Eropa dengan Asia. Hal ini mendorong bangsa Eropa untuk berlomba-lomba mencari dan mendapatkan barang dagangan yang lebih murah. Untuk itu mereka harus melakukan pelayaran ke Asia Timur untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah.

3) Keinginan untuk menyebarkan Agama Nasrani

Kekalahan bangsa Eropa Barat dalam Perang Salib menimbulkan semangat orang Eropa untuk menyebarkan agama nasrani di berbagai daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semboyan penjelajahan samudera mencari daerah timur, yaitu: *Gospel*; tugas suci menyebarkan agama nasrani, *Gold*; mencari harta kekayaan (logam mulia), *Glory*; mencari kejayaan dan kekuasaan

4) Humanisme dan Renaissance

Jatuhnya Konstantinopel telah membawa perubahan besar terhadap segi kehidupan bangsa Eropa, Perang Salib telah membuka mata bangsa Eropa bahwa hasil budaya Islam ternyata lebih tinggi dari hasil budaya Eropa,. Berdasarkan penglihatan itu akhirnya timbullah gerakan-gerakan untuk mengubah ketertinggalannya.

Humanisme berasal dari bahasa Latin, yaitu *Humanus* yang berarti manusia. Pengertian Humanisme dalam arti luas adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai individu dan keduniawian. Humanisme berkembang pesat setelah bangsa Eropa bangkit kembali untuk mempelajari ilmu pengetahuan peninggalan bangsa Yunani dan Romawi Kuno untuk kepentingan umat manusia. Dari gerakan ini bangsa Eropa berhasil menemukan norma kehidupan, ilmu pengetahuan dan filsafat yang bersal dari jaman Yunani dan Romawi Kuno.

Renaissance berasal dari bahasa Perancis, yaitu *re* = kembali, dan *natie* = lahir. Dalam pengertian luas Renaissance berarti suatu gerakan yang berusaha mengembalikan kelahiran kembali keagungan kebudayaan Yunani dan Romawi Kuno di segala bidang kehidupan.

Tokoh- tokoh Humanisme antara lain: Desiderius Erasmus, Petrarca, Thomas Morus. Tokoh-tokoh Renaissance antara lain: Leonardo da Vinci (pelukis), Michael Angelo (pematung dan pelukis).

5) Perkembangan Ilmu dan Teknologi Pelayaran

Pelayaran dan penjelajahan Samudera dalam rangka menemukan daerah baru mendorong berkembangnya pemikiran dan penemuan dalam bidang ilmu dan teknologi. Pada Abad ke-15 tumbuh anggapan bahwa bumi itu bulat. Hal ini mendorong semakin ramainya penjelajahan samudera. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat mereka bebas dalam menentukan arah, karena mereka nantinya akan kembali lagi ketempat asalnya. Dengan diketemukannya kompas dan upaya untuk membuat peta semakin mendorong bangsa Eropa untuk mengunjungi daerah timur.

6) Dampak Revolusi Industri

Revolusi Industri adalah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam bidang industri yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan diketemukannya mesin uap maka tenaga manusia dan hewan mulai tergantikan. Revolusi Industri menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari daerah pasaran industri dan daerah untuk mendapatkan bahan mentah yang diperlukan untuk kepentingan industri tersebut. Dengan adanya revolusi tersebut bangsa Eropa barat berlomba-lomba untuk mendapatkan daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Utara sebagai pemasok bahan mentah.

3. Proses Kedatangan Bangsa Barat Sampai Terbentuknya Kolonialisme di Indonesia

Cengkih, pala, dan fuli bersama-sama rempah-rempah yang lain seperti lada dan kayu manis merupakan komoditi dari kepulauan Indonesia yang paling dicari oleh para pedagang Eropa itu. Bangsa Eropa yang mencapai Nusantara dan mendirikan koloninya ialah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.

Akibat dari pecahnya Perang Salib menimbulkan terputusnya hubungan antara Eropa Barat dan Asia Barat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa Barat untuk mendapatkan barang-barang rempah dari Timur yang sangat dibutuhkan di Eropa. Untuk itu mereka berlomba-lomba mencari daerah Timur (Indonesia) sebagai tempat komoditi rempah-rempah.

1) Penjelajahan samudera oleh bangsa Portugis

(a) Bartholomeus Diaz

Dia adalah penjelajah samudera pertama yang diperintahkan raja Portugis untuk mengatur perjalanannya ke Afrika Barat. Dia melakukan pelayaran melalui arah timur dengan menyusuri pantai Barat Afrika. Pembuatan peta dia lakukan untuk memudahkan para pelaut Portugis lain menemukan jalan pintas ke Hindia Timur. Pada tahun 1488 dia berhasil tiba di ujung Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan.

(b) Vasco da Gama

Merintis jalan yang pernah ditempuh oleh Bartholomeus Diaz dia lalu menyusuri Pantai Timur Afrika dan singgah di pelabuhan yang dikuasai oleh Islam (Mombasa, Milindi, dan Kenya). Pada tahun 1498 dia berhasil sampai di Calicut India. Calicut adalah kota dagang utama dipantai Barat India. Dia yakin bahwa India adalah pusat rempah-rempah yang ia impikan. Dan dalam waktu yang singkat Portugis berhasil mendirikan koloni-koloni di sekitar Samudera Hindia, juga benteng-benteng dan pos keamanan di India, Indonesia sampai Madagaskar.

(c) Alfonso d'alburquerque

Setelah Vasco da Gama menguasai Calicut dia ditunjuk menjadi Gubernur dipangkalan dagang tersebut. India merupakan tempat untuk mendapatkan rempah-rempah tetapi bukan daerah penghasil rempah-rempah. Untuk itulah dikirim Alfonso d'alburquerque untuk mencari dan menguasai pusat rempah-rempah. Pada tahun 1511 ekspedisi Alfonso d'alburquerque sampai diperairan Selat Malaka. Dengan armadanya dia merebut dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pada tahun 1512 dia tiba di Ternate (Maluku) dan menjalin kerjasama dengan Ternate yang sedang berselisih dengan Tidore.

2) Penjelajahan samudera oleh bangsa Spanyol

(a) Christopher Columbus

Christopher Columbus dikenal sebagai penemu benua Amerika, walaupun ia hanya tiba di Amerika Tengah, kepulauan Bahama, Cuba, Jamaica dan Haiti.

Pada awalnya Columbus berniat melakukan penjelajahan Samudera untuk mencari tanah Hindia sebuah dunia baru di Timur. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat maka dengan tiga buah kapal berukuran besar dia memimpin ekspedisi pelayaran menuju kearah Barat mengarungi Samudera

Atlantik. Pada tahun 1492 dia mendarat di kepulauan Bahama dan mengira tempat itu adalah tanah Hindia, yang selanjutnya dia beri nama San Salvador dengan penduduk aslinya yang diberi nama Indian. Perjalanan berikutnya dia menemukan Haiti dan Cuba. Keberhasilan Columbus menemukan benua Amerika telah mengubah pandangan orang Eropa tentang Samudera Atlantik yang selama ini dianggap mengerikan yang semula dipandang sebagai *Sea of Darknes* (Laut Kegelapan) sebagai laut yang ganas dan mengerikan.

(b) Ferdinand Magelhaens

Keberhasilan Columbus mendarat di kepulauan Bahama telah mendorong Magelhaens untuk meneruskan misi yang diembannya yaitu menemukan tanah Hindia sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Dengan bekal informasi dan rute yang telah ditempuh oleh Columbus dia berangkat dengan lima buah besar bersama kapten yan Sebastian del Cano dan sastrawan Italia Pigafetta. Magelhaens berlayar menyusuri pantai Timur Amerika dengan rute sebagai berikut: Tanjung Verde (di lautan Atlantik) menyeberang lautan Atlantik kearah selatan hingga sampai ke sebuah selat sempit yang lantas dia beri nama selat Magelhaens. Dari selat Magelhaens mereka mengarungi Lautan yang tenang, yang kemudian dia namakan Lautan Pasifik. Tiga bulan kemudian akhirnya mereka tiba dipulau Guam. Kemudian sampai dikepulauan Massava yang akhirnya diberi nama Filipinna. Dikepulauan inilah Magelhaens terbunuh dikarenakan perselisihan dengan penduduk setempat. Akibatnya pengikut Magelhaens meninggalkan Filipina berlayar ke arah selatan dipimpin oleh Sebastian del Cano. Rombongan itu sampai di Kepulauan Maluku. Di kepulauan ini kapal-kapal mereka penuh dengan rempah-rempah. Kemudian rombongan kembali ke Spanyol melewati Laut Timor terus menuju Tanjung Harapan sampai Spanyol. Sejarah mencatat ekspedisi Magellhaens sebagai penjelajahan pertama dalam mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat.

4. Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia.

Telah dijelaskan dimuka bahwa pada permulaan Abad Pertengahan orang-orang Eropa sudah mengenal hasil-hasil dari Timur, termasuk

rempah-rempah dari Indonesia. Setelah terjadinya Perang Salib kebutuhan akan rempah-rempah yang didupatkannya dari pelabuhan-pelabuhan dilaut tengah menjadi terputus. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung pada sumbernya. Dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah melalui berbagai penjelajahan samudera akhirnya Bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia yang merupakan pusat produksi rempah-rempah.

(a) Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia

Pada Tahun 1453 sebagai akibat dari Perang Salib, Kontantinopel yang merupakan pusat perdagangan dilaut tengah jatuh ketangan bangsa Turki yang beragama Islam. Dengan sendirinya pemerintah bangsa Turki berusaha untuk menghambat perdagangan rempah-rempah ke Eropa yang melalui wilayahnya. Akibatnya harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Oleh karena itu orang-orang Eropa berusaha untuk dapat membeli rempah-rempah tersebut dari daerah asalnya. Hal ini mendorong usaha penjelajahan untuk dapat menemukan jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah yaitu daerah timur (termasuk Indonesia). Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Vasco da Gama portugis mampu menguasai Calicut, Diu, dan Goa. Pada tahun 1511 Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia dapat dikuasai. Akan tetapi bangsa Portugis belum puas sebab Malaka bukanlah daerah asal penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menguasai kepulauan rempah-rempah yaitu kepulauan Maluku.

Pada tahun 1512 dibawah pimpinan d'alburquerque Portugis berlayar menuju Maluku. Dengan misi *Gold, Gospel* dan *Glory* mereka datang ke Maluku untuk berdagang. Akibat kedatangan orang-orang Portugis di Maluku harga rempah-rempah menjadi naik. Oleh sebab itu sultan-sultan di Maluku (Ternate dan Tidore) berlomba-lomba menjual rempah-rempah mereka kepada pedagang-pedagang Portugis. Raja-raja bersaing untuk menjadi sahabat pembeli yang kaya raya tersebut. Keadaan dari persaingan raja-raja di Maluku tersebut menguntungkan Portugis. Raja Ternate meminta Portugis untuk mendirikan suatu benteng di Ternate untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Permohonan ini diterima

dengan baik oleh Portugis, dari kesepakatan ini pihak Portugis mendapatkan hak untuk memonopoli perdagangan cengkeh. Akibatnya rakyat Ternate menjadi sangat tertekan. Mereka tidak lagi menjual cengkehnya dengan bebas. Harga cengkeh ditetapkan oleh Portugis dengan serendah-rendahnya. Keadaan ini merubah hubungan baik menjadi hubungan permusuhan.

Akibat dari kedatangan orang-orang Portugis di Maluku adalah: agama Katolik pertama kali masuk ke Indonesia, perdagangan rempah-rempah di Maluku menjadi sangat ramai, jalur pelayaran yang melalui utara Indonesia (melalui Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan) menjadi terbuka.

(b) Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia

Pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku dari Filipina menuju Kalimantan kemudian menuju Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka tergabung dalam ekspedisi Magelhaens-del Cano. Kedatangan mereka disambut oleh rakyat Maluku (Tidore). Kedatangannya dapat dimanfaatkan oleh Tidore sebagai sekutu untuk melawan Ternate yang lebih dahulu bersekutu dengan Portugis.

Kedatangan Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencapai daerah yang diidam-idamkan, yaitu daerah yang merupakan sumber rempah-rempah. Orang-orang Spanyol senang berdagang di Maluku sehingga lambat laun jumlah penduduk Spanyol di Maluku menjadi semakin banyak.

Dengan kedatangan bangsa Spanyol di Maluku maka kedua bangsa yaitu Portugis dan Spanyol menyatakan berhak atas Maluku. Kedatangan Spanyol di Tidore dianggap oleh Portugis sebagai pelanggaran terhadap hak monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu Portugis dengan dibantu Ternate menyerbu Spanyol yang juga dibantu oleh Tidore, Bacan, dan Jailolo. Namun akhirnya kedua belah pihak menyadari akan kerugian yang dicapai. Akhirnya pada tahun 1534 melalui suatu perundingan orang-orang Spanyol pergi meninggalkan Maluku. Dan sekali lagi Portugis mendapatkan kebebasan penuh untuk memonopoli memperdagangkan rempah-rempah.

(c) Kekuasaan VOC

Pada waktu bangsa Portugis sudah berhasil mencapai daerah Timur (India dan Indonesia) dan menjadikan Lisabon (Ibukota Portugis) sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, saat itu bangsa Belanda masih berkuat dalam perdagangan antar negara Eropa. Bangsa Belanda menjadi pedagang perantara dengan mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang menjadi pusat penumpukkan rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa Utara. Pada tahun 1585 kota Lisabon dikuasai oleh bangsa Spanyol. Sejak itu putuslah hubungan perdagangan rempah-rempah antara Lisabon dan Bangsa Belanda. Tetapi sebagai akibat dari keadaan itu Bangsa Belanda memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah secara langsung dari negeri asalnya yaitu di Kepulauan Indonesia.

Pada Tahun 1595 dengan empat buah kapal dagang dibawah pimpinan Cornelis De Houtman bangsa Belanda berangkat menuju kepulauan Indonesia. Setelah berlayar selama 14 hari mereka berhasil mendarat di Banten. Kedatangan bangsa Belanda untuk berdagang disambut dengan baik oleh rakyat Banten, karena dapat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi daerah Banten. Tetapi suasana persahabatan itu tidak berlangsung lama, karena saat itu timbul persaingan diantara pedagang-pedagang Eropa. Orang-orang Belanda seringkali berbuat tidak terpuji sehingga banyak menimbulkan keonaran. Akibatnya penguasa Banten mengusirnya dari tanah Banten Suasana permusuhan semakin menjadi-jadi ketika bangsa Belanda menembaki Banten dari kapal-kapal mereka. Kesombongan Belanda ini segera tersiar keseluruh bandar perdagangan pantai Utara Jawa. Akibatnya kapal-kapal Belanda tidak diterima berlabuh dibandar-bandar tersebut.

Pada tahun 1598 dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Van Waerwijck Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten. Kali ini mereka diterima baik oleh penguasa Banten, karena pada saat itu hubungan Banten dengan bangsa Portugis sedang memburuk. Kedatangan orang-orang Belanda di Pelabuhan Tuban dan Maluku juga mendapat sambutan baik dari penguasa-penguasa setempat.

Dengan sikapnya yang baik orang-orang Belanda mendapatkan suatu keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah. Hal ini

mendorong orang-orang Belanda yang lain datang ke Indonesia, dengan semakin banyaknya orang-orang Belanda ini menimbulkan persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Akibatnya mereka tidak lagi memperdulikan tinggi rendahnya harga rempah-rempah. Jelas ini sangat merugikan pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini dibentuklah serikat dagang yang disebut VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) atas usulan salah satu pembesar Belanda yang bernama Johan Van Olden Borneveld.

Adapun tujuan dibentuknya VOC di Indonesia adalah: menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa maupun Bangsa-bangsa Asia, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang besar, untuk melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Di awal kedatangannya VOC menerapkan sistem perdagangan kemitraan (*partnership*). VOC mengupayakan suatu sistem monopoli atas rempah-rempah dengan cara membina kemitraan dengan penguasa lokal. Pihak VOC berkepentingan secara ekonomis maupun secara politis untuk memerangi Portugis. Setelah Portugis lenyap dari Nusantara, VOC membangun kemitraan dengan salah satu pihak tertentu yang sedang bertikai dalam suatu kerajaan tertentu. Segala cara dilakukan VOC untuk menguasai kekayaan Nusantara.

Dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita tersebut maka satu persatu pelabuhan penting segera direbut dari penguasa setempat maupun bangsa Eropa yang lainnya. Setelah berhasil Belanda juga menerapkan politik *Divide Et Impera* (memecah dan menguasai) atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba untuk menaklukkan satu persatu kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan itu takluk maka diterapkanlah sistem monopoli terutama untuk perdagangan rempah-rempah. Agar VOC dapat mempertahankan wilayahnya maka pemerintah Belanda memberikan hak istimewa, hak tersebut berupa surat izin yang lebih dikenal dengan hak *Octrooi*, yang meliputi : boleh membentuk tentara dan mendirikan benteng sendiri, boleh membuat mata uang sendiri, boleh mengangkat dan

memberhentikan pegawai-pegawai sendiri dari pangkat rendah sampai Gubernur Jendral, boleh berperang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengann raja-raja di negeri asing, dan mendapat hak monopoli.

Untuk memperkuat kedudukannya maka diangkatlah seorang pemimpin yang disebut Gubernur Jendral. Gubernur Jendral yang pertama adalah Pieter Both (1610-1614). Kemudian yang kedua adalah John Pieterzoon Coen (1619). Para Gubernur tersebut ditempatkan di daerah Ambon sebagai pangkalan dagang yang paling kuat. Karena letak Ambon yang kurang strategis maka VOC berkeinginan untuk menguasai daerah Banten untuk dijadikan pangkalan dagang yang paling kuat. Namun VOC mengalami kesulitan menguasai kota Banten, Maka J.P. Coen mendirikan kantor dagang didaerah muara sungai Ciliwung didaerah Jayakarta. Akibatnya terjadi persaingan antara VOC dengan EIC yang lebih dahulu mendirikan kantor dagang disana. Persaingan ini menimbulkan perang teluk di Jayakarta. Ketika J.P Coen meminta bantuan pasukan ke Ambon, di Jayakarta terjadi perselisihan antara orang-orang Inggris dengan penguasa Banten. Orang-orang Inggris berhasil diusir dari Jayakarta. Waktu J.P Coen kembali Inggris sudah tidak ada. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menduduki Jayakarta. Pada tahun 1619 kota Jayakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan namanya diubah menjadi Batavia, sesuai dengan nama nenek moyang bangsa Belanda yang bernama bangsa Bataaf. Dengan berdirinya Batavia sebagai pusat kompeni, maka kedudukan VOC semakin semakin kuat. Usaha VOC untuk menguasai perdagangan semakin menjadi lebih mudah. Sejak J.P. Coen berkuasa ia menjalankan politik monopoli dengan kekerasan melebihi dari pelaksanaan praktek monopoli yang dilakukan bangsa Portugis. Yang paling menderita akibat monopoli ini adalah rakyat Maluku. Dalam melaksanakan monopoli tersebut VOC menetapkan beberapa peraturan. Isi dari peraturan itu adalah sebagai berikut: rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC, jumlah tanaman ditetapkan oleh VOC, tempat penanaman ditentukan oleh VOC, dan jenis tanaman ditentukan oleh VOC.

Untuk melaksanakan peraturan ini, penguasa Belanda melaksanakan pelayaran *Hongi* (*Hongi* adalah armada perahu dagang besar yang dipersenjatai yang disebut *kora-kora*) yaitu pelayaran keliling yang dilakukan

oleh Belanda untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan yang dibuat oleh VOC. Jika terjadi pelanggaran maka VOC tidak segan-segan untuk melaksanakan *ekstirpasi*, yaitu hukuman yang berupa pembinasan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar peraturan monopoli dan pemiliknya disiksa atau dibunuh. Sistem hak monopoli dan pelayaran Hongi yang dilakukan oleh VOC tersebut telah meninggalkan bekas luka perasaan yang mendalam bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk dilupakan.

Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke 18, hal disebabkan oleh banyaknya korupsi, biaya perang yang besar, persaingan dengan kongsi dagang lain, utang VOC yang besar. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usaha VOC mundur, berkembangnya Liberalisme, anggaran pegawai terlalu besar, pendudukan Prancis atas Belanda, VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800

(d) Kekuasaan Perancis di Indonesia

Berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1800 ditandai dengan tidak berlakunya hak oktroinya, maka semua hutang-piutang VOC menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda berikut dengan daerah kekuasaannya.

Pada tahun 1800 Napoleon Bonaparte dari Prancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan menjadikan saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.

Kebijakan Lois Napoleon yang pertama yaitu mengirimkan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta mempertahankan wilayah Jawa dari kemungkinan datangnya serangan Inggris.

Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada di bawah kekuasaannya. Kebijakkannya seringkali bertentangan dengan raja-raja Jawa pada saat itu, karena bertentangan dengan tradisi yang ada.

Kebijakan Daendels pada dasarnya memprioritaskan pada pertahanan di pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Kebijakan itu antara lain :Bidang Pertahanan: menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar penduduk lokal (pribumi), membangun benteng di

beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (*het grote postweg*) dengan sistem kerja rodi yang membawa jatuh banyak korban, membangun pelabuhan dan armada laut berpusat di Surabaya

Bidang pemerintahan: kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji, membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi Negara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 *perfectur*, membangun kantor-kantor pengadilan, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden

Bidang Keuangan: menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda, meningkatkan pemasukkan kas negara dengan cara-cara yang dilakukan VOC sebelumnya.

Namun sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai gubernur Jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens.

Pemerintahan Janssens hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah. Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga dengan ditanda tangannya perjanjian Tuntang yang isinya sebagai berikut: seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris, Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, Pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus, hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab Inggris

(e) Kekuasaan Inggris

Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816).

Tugas Thomas Stamford Raffles adalah mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan. Kebijakan Raffles meliputi a). Bidang pemerintahan: membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan,

mengangkat Bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, mempraktekan sistem juri dalam pengadilan seperti di Inggris, melarang adanya perbudakan, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor; b). bidang perekonomian: melaksanakan sistem sewa tanah (*Land Rente*), menjual tanah pada pihak swasta, melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat dalam perdagangan, memonopoli garam untuk kepentingan rakyat, menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi

Pemerintahan Raffles hanya bertahan sampai tahun 1816. Hal ini terkait keadaan di negeri Eropa. Pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Selanjutnya kekuasaan Inggris di Indonesia kembali diserahkan kepada Belanda melalui *Convention of London* (1814) yang berisi: Belanda menerima kembali wilayah jajahannya kembali dari Inggris dengan wilayah sesuai dengan perjanjian Tuntang sebelumnya., Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Srilangka dari Belanda

(f) Kekuasaan Belanda di Indonesia

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda dipegang oleh 3 orang komisararis jendral yaitu Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Tugas mereka yaitu menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa peralihan itu berlangsung dari tahun 1816-1819 saat itu, keuangan Belanda merosot karena selain kerugian VOC yang harus dibayar juga karena biaya yang amat besar untuk menghadapi perang Diponegoro dan perang Paderi.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut maka diberangkatkanlah Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan penerimaan Negara untuk mengatasi masalah keuangan. Van den Bosch melaksanakan *Cultuur Stesel* (tanam paksa) karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk.

5. Sistem Tanam Paksa dan Politik Pintu Terbuka

Peperangan yang dihadapi VOC maupun kerajaan Belanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa, dampak revolusi Perancis. Akibatnya kas negara defisit, sebab peperangan itu memerlukan biaya sangat besar.

Untuk itu pemerintah jajahan melaksanakan *Cultur Stelsel* (Sistem Tanaman) 1830-1870. Tujuannya memperoleh pemasukan uang sebanyak mungkin untuk menutup defisit kas negara dan pembangunan kerajaan Belanda. Terkenal sistem *Batig Slot*, atau Saldo plus, artinya upaya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang sedikit atau tanpa modal. Disebut tanpa modal uang tetapi modal kekuasaan di tanah jajahan. Dengan kata lain sistem tanaman itu dilakukan dengan paksa, karena itu *Cultur Stelsel* disebut juga Tanam Paksa.

Rakyat dipaksa menanam tanaman yang sangat laku di pasaran dunia, seperti: kopi, tembakau, tebu, nila, teh, kapas. Tanaman terutama diadakan di tanah rakyat di pedesaan selain yang tak bertuan yang menjadi tanah negara (tanah GG atau milik Goebornor General).

Dengan memeralat penguasa pribumi rakyat dipaksa bekerja tanpa upah atau disebut rodi. Ada yang kerja rodi jauh dari tempat tinggalnya dalam waktu yang sangat lama. Rakyat menderita, banyak yang sakit atau mati karena pekerjaan berat dan sangat kekurangan makan. Akibat selanjutnya tanah pertanian rakyat terlantar, keluarga yang ditinggalkan ikut menderita karena jugakekurangan pangan.

Sistem Tanam paksa lebih kejam dari sistem monopoli dan penyerahan wajib di Jaman VOC. Sehingga pada hakekatnya tanam paksa merupakan perkembangan lebih lanjut sistem monopoli dan penyerahan wajib, dimana penjajah mengeksploatasi kekayaan Indonesia dan memeras keringat rakyat.

Penderitaan rakyat Indonesia menjadi perhatian beberapa orang Belanda yang disebut orang Moralis/Humanis; diantaranya van Deventer. Intinya Belanda berhutang budi kepada rakyat Indonesia dan harus dibalas hutang budi tersebut antara lain dengan adanya Trilogi van Deventer. Pengaruh Revolusi Perancis melahirkan golongan Liberal yang memuja

kebebasan di segala bidang kehidupan. Setelah golongan Liberal berkuasa Tanam Paksa dicabut (1870). Hal ini sesuai dengan keinginan golongan Liberal di bidang ekonomi yaitu para pengusaha swasta atau golongan kapitalis. Maka lahirlah politik Pintu Terbuka (*open door policy*) yaitu modal swasta dari manapun boleh berusaha di Indonesia dan tidak dimonopoli Pemerintah. Akibatnya usaha swasta dapat mengeksploatasi kekayaan Indonesia di bidang perkebunan (kopi, teh, karet, coklat, tembakau) dan pertambangan (timah, emas, batubara, minyak mentah).

Salah satu contoh pelaksanaan Trilogi van Deventer yaitu: Edukasi, Irigasi, dan Kolonialisasi. Bahwa pendidikan pribumi perlu dimajukan secara bertahap sejak tingkat dasar, menempuh sampai tinggi. Tempat untuk tingkat menengah dan tinggi dipersulit hanya untuk keluarga priyayi dan bangsawan. Hasil pendidikan untuk kepentingan penjajah maupun perusahaan sebagai pegawai rendah (klerk). Dokter penting untuk kesehatan rakyat, terutama para buruh perusahaan/perkebunan agar tidak merugi.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi penjelajahan samudera, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Pembelajaran dilakukan secara kelompok dan individu menggunakan pendekatan andragogi, humanistik, dan konstruktivistik. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan.. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.

2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas. Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 4 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya .setiap kelompok mengerjakan satu tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK 1

Tugas Individu

Pilih satu jawaban yang paling benar

1. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia Timur dapat diungkapkan melalui slogan berikut ini
 - a. Vini, Vidi, Vici
 - b. Liberte, Egalitee Franternite
 - c. Gold, Gospel, Glory
 - d. Kolonialisme, Imperialisme, Monopolisme
 - e. Devide et Impera, Pak Mcdorlandica
2. Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian antara Portugis dan Spanyol yang berisi tentang
 - a. kerjasama dalam perdagangan
 - b. pengambilalihan kekuasaan daerah koloni
 - c. pembagian wilayah pencarian rempah-rempah
 - d. kesepakatan tentang monopoli barang dagangan
 - e. pembagian kekuasaan atas beberapa negara koloni
3. Peengan penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa dilandasi oleh semangat *reconquista* yakni semangat untuk

- a. mencari kekayaan
 - b. menyebarkan agama
 - c. mencari daerah baru
 - d. mendapatkan kejayaan
 - e. menggalang persaudaraan
4. Perluasan aktivitas ekonomi pemerintah kolonial dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara induk ditandai dengan kebijakan ...
- a. politik etis
 - b. politik ekonomi liberal
 - c. cultur stelsel
 - d. landreform tanah
 - e. penyerahan wajib dan rodi
5. Peristiwa yang mendorong perkembangan imperialisme modern di dunia adalah
- a. perang salib
 - b. renaissance
 - c. revolusi industri
 - d. penemuan sumber daya alam
 - e. penemuan daerah baru

LK 2

Tugas Kelompok

Diskusikan topik-topik berikut ini:

1. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya penjelajahan samudera
2. Hubungan antara penjelajahan samudera dengan timbulnya Kolonialisme dan Imperialisme
3. Perbedaan penerapan Politik Kolonial dari Masa VOC sampai Politik Etis dan pengaruhnya terhadap kehidupan Bangsa Indonesia
4. Perbandingan Politik Kolonial Belanda dan Jepang serta pengaruhnya terhadap kehidupan Bangsa Indonesia

F. RANGKUMAN:

- Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudera, antara lain : a) Jatuhnya Konstantinopel yang berperan sebagai Bandar transito ke tangan Turki pada tahun 1453, b) Semangat Perang Salib yang dimiliki orang Portugis, c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, d) kisah perjalanan Marcopolo (1254-1324), e) keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi, f) semboyan Gold, Gospel, dan Glory (mencari kekayaan,kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen.
- Cengkih, pala, dan fuli bersama-sama rempah-rempah yang lain seperti lada dan kayu manis merupakan komoditi dari kepulauan Indonesia yang paling dicari oleh para pedagang Eropa itu. Bangsa Eropa yang mencapai Nusantara dan mendirikan koloninya ialah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Akibat dari pecahnya perang salib menimbulkan terputusnya hubungan antara Eropa Barat dan Asia Barat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa Barat untuk mendapatkan barang-barang rempah dari timur yang sangat dibutuhkan di Eropa. Untuk itu mereka berlomba-lomba mencari daerah timur (Indonesia) sebagai tempat komoditi rempah-rempah,

G. UMPAN BALIK

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penjelajahan samudera ?
2. Kesulitan apa yang anda alami dalam menyampaikan materi ini?
3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penjelajahan samudera?
4. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
5. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

PERJUANGAN DAN USAHA

MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat dapat menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI, dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan
2. Menganalisis dinamika hubungan Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan RI
3. Menganalisis hubungan pusat dan daerah pada awal kemerdekaan

C. URAIAN MATERI

a) Permasalahan Indonesia-Belanda di Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah jaminan bagi terlepasnya bangsa Indonesia dari pengaruh kolonialisme. Belanda bertujuan menghancurkan sebuah negara yang dianggapnya dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang dan berusaha memulihkan suatu rezim kolonial yang telah dibangun sekitar 350 tahun. Usaha-usaha menggagalkan kemerdekaan tersebut berasal dari dua faktor yaitu upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dan munculnya gangguan-gangguan keamanan di daerah yang didukung oleh Belanda.

Euforia revolusi segera melanda Indonesia, khususnya kaum muda Indonesia yang merespon kemerdekaan. Semangat revolusi juga terjadi dalam karya sastra dan kesenian selain dalam bidang politik. Munculah sebuah generasi sastra yang dikenal sebagai Angkatan 45, yaitu para sastrawan Indonesia yang daya kreasinya memuncak pada masa revolusi kemerdekaan tersebut, mereka antara lain Chairil Anwar, Mochtar Lubis dan lain-lain. Mereka yakin bahwa seni bagian dari perkembangan Revolusi.

BKR yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 bukan tentara dengan organisasi yang bersifat formal dan professional namun hanya bersifat kerakyatan. BKR dari pusat sampai daerah berada di bawah KNIP dan KNI daerah dan tidak berada dibawah presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Status BKR tersebut menjadikan para pemuda tidak puas sehingga membentuk badan-badan perjuangan "Komite Van Aksi". Komite Van Aksi terdiri atas API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia). Badan perjuangan lainnya juga dibentuk seperti Hisbullah, Sabilillah ataupun badan perjuangan khusus seperti Tentara Pelajar (TP).

Selanjutnya, para pemuda BKR dan badan-badan perjuangan berusaha melucuti senjata pasukan Jepang sehingga menimbulkan konflik. Posisi pasukan Jepang dalam situasi dilematis, karena pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jenderal Mac Arthur (sekutu) memerintahkan kepada Marsekal Terauchi untuk mempertahankan "*status quo*" di daerah-daerah bekas pendudukannya. Pada tanggal 16 September 1945 Angkatan Perang Inggris dalam SEAC (South East Asian Command) dibawah Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta dan melakukan tekanan kepada Jepang untuk tetap menjalankan kebijakan mempertahankan "*status quo*" di Indonesia.

Kebijakan mempertahankan status quo tersebut disebabkan pasca kemerdekaan Indonesia, tentara Sekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan Jepang. Pasukan yang terbanyak berasal dari pasukan Inggris karena hal ini bagian dari strategi perang Sekutu bahwa Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Southeast Asia Command yang menjadi tanggung jawab Laksamana Mountbatten dari Inggris (Sayidiman Suryohadiprojo,1996:53). Pada masa pendudukan Jepang, terdapat warga Eropa dan Amerika Serikat ditawan pasukan Jepang di Indonesia. Ketika Perang Dunia II berakhir, para tawanan tersebut dibebaskan dan pasukan Jepang diberi tugas untuk mengurusinya. Instruksi dari Sekutu tersebut tidak memperhitungkan kekuasaan berdirinya negara yang telah memproklamkan kemerdekaannya yaitu Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 September 1945 tentara Inggris mendarat lagi dipimpin Sir Philip Cristison, panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) dengan membawa pasukan NICA (Netherlands India Civil Administration). Tentara Sekutu dibawah Pimpinan Cristison pada dasarnya bertindak sebagai tentara pendudukan dengan maksud dan tujuan untuk melucuti tentara jepang yang kalah perang, namun kesempatan ini oleh Inggris telah disalahgunakan tugas utamanya, karena bersama tentara Inggris ikut serta pula pegawai-pegawai Belanda ke Indonesia untuk melaksanakan pidato politik Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 (R. Ambarman,1980:91). Belanda masih beranggapan mempunyai kekuasaan *de facto* atas Indonesia meski sebenarnya kekuasaan tersebut telah berakhir semenjak *occupatio belli Japonica* atau penyerahan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati sehingga dimulai masa Pendudukan Jepang di Indonesia.

Sementara itu, tugas AFNEI di Indonesia adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:32):

- 1) Menerima penyerahan dari Jepang
 - 2) Membebaskan tawanan perang, khususnya dari negara-negara sekutu
 - 3) Menegakkan dan mempertahankan keadaan yang kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil
 - 4) Menuntut penjahat perang di pengadilan sekutu
- Kedatangan sekutu di Indonesia diikuti pasukan Belanda dengan tujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. Namun kedatangan Panglima AFNEI Sir Philip Cristison mengakui secara *de fakto* negara Indonesia. Hal ini yang membuat kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghormati tugas-tugas AFNEI. Namun kebijakan politik Cristison dianggap merugikan kepentingan Belanda sehingga akhirnya ia digantikan oleh Letnan Jendral Sir Montaque.

Sikap simpati rakyat terhadap pasukan Sekutu segera berbalik karena pada kenyataannya pasukan NICA berusaha menegakkan pengaruh di tanah bekas jajahannya tersebut. Di daerah, yang didatangi pasukan sekutu seringkali terjadi insiden konflik dengan masyarakat setempat. Konflik tidak hanya terbatas pada pasukan Sekutu dan Belanda, namun juga pasukan Jepang yang bertanggung jawab terhadap "status quo" di Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api, 10 Nopember di Surabaya, Palagan Ambarawa di Jawa Tengah,

Pertempuran 5 hari di Semarang dan lainnya sebagai manifestasi dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Diantara beberapa peristiwa pertempuran antara Indonesia melawan kekuatan asing pasca kemerdekaan yang dianggap paling spektakuler adalah Peristiwa 10 Nopember. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang pernah dilakukan pasukan Inggris atas nama Sekutu di Indonesia dan mengakui secara jujur bahwa Surabaya seperti neraka/*inverno hell*. Peristiwa 10 Nopember sebagai suatu rangkaian kejadian yang dimulai dengan kedatangan pasukan Sekutu dengan menggunakan identitas AFNEI di wilayah Jawa Timur.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya menyambut kedatangan pasukan Sekutu dengan senang hati terkait tugas dari pasukan Sekutu untuk melucuti pasukan Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II. Namun masyarakat Surabaya berbalik menjadi antipati terhadap Sekutu ketika terdapat indikasi bahwa kekuatan pasukan Belanda (NICA: *Netherland Indies Civil Administration*) ikut bersama pasukan Sekutu. Kekuatan NICA diprediksi sebagai awal dari rencana Belanda melanjutkan praktek kolonialisme-imperialisme di Indonesia. Namun Sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surabaya dengan adanya kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A Suryo dengan Brigjen A.W.S Mallaby. Kesepakatan tersebut antara lain: Inggris tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda; menjalin kerja sama kedua belah pihak untuk menciptakan keamanan, akan dibentuk kontrak biro, pasukan Inggris hanya bertugas melucuti pasukan Jepang

Dengan kesepakatan di atas maka pasukan Inggris diperkenankan untuk memasuki Kota Surabaya. Dalam perjalanan waktu, pasukan Inggris tidak melaksanakan kesepakatan di atas sehingga sering muncul konflik antara pasukan Inggris dengan masyarakat Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris secara sepihak menduduki gedung-gedung pemerintahan di Surabaya yang dipertahankan oleh para pemuda-pemuda di sana sehingga konflik memuncak. Untuk meredakan ketegangan, Presiden Sukarno datang ke Surabaya sehingga untuk sementara waktu ketegangan antara kedua pihak dapat diredam.

Konflik tiba-tiba memanas ketika tanggal 31 Oktober 1945 Brigjen Mallaby dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan terbunuh. Pasukan Inggris menuduh bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh warga Surabaya. Inggris memberi ultimatum kepada warga Surabaya yang terlibat pembunuhan tersebut, untuk menyerahkan diri. Jika ultimatum ini tidak ditanggapi maka tanggal 10 Nopember 1945, Kota Surabaya akan dibumihanguskan. Tak seorangpun yang menanggapi ultimatum tersebut sehingga Surabaya diserang pasukan Inggris dari darat, laut dan udara. Rakyat Surabaya mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pertempuran ini akhirnya dikenal sebagai Hari Pahlawan yang diperingati tiap tanggal 10 Nopember.

b). Sejarah Lahirnya TNI

Situasi menjadi semakin tidak stabil ketika RI yang baru saja merdeka belum mempunyai alat pertahanan negara untuk mempertahankan diri dari bahaya yang berasal dari dalam dan luar. Melihat perkembangan situasi yang membahayakan negara ini, maka para pemimpin negara, menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu Angkatan Perang. BKR tidak dapat berfungsi maksimal karena dibentuk secara lokal sehingga tidak dapat mengadakan pertahanan negara secara sentral.

Kebijakan pemerintah yang belum membentuk tentara ini sebagai bagian dari kekhawatiran dari pemerintah bahwa kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan akan dituduh oleh Sekutu sebagai usaha dari pemerintah Pendudukan Jepang jika pemerintah RI membentuk institusi tentara. Untuk menghapus pandangan dari Sekutu tersebut maka Pemerintah menunjukkan sikap yang penuh perdamaian terhadap pasukan Sekutu karena jika kemerdekaan Indonesia dituduh sebagai pemberian Jepang maka Sekutu dimungkinkan tidak mengakui kemerdekaan itu dan menganggap Indonesia secara sah masih menjadi daerah jajahan Belanda (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:53-54)

Di dalam undang-undang pembentukannya, fungsi BKR secara tersamar-samar disebutkan sebagai "memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara bersangkutan". BKR berada dibawah pengarahannya KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dibawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Hambatan paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat

efisiensi militer yang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat.

Pemerintah akhirnya memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo yang ditugaskan membentuk tentara Kebangsaan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluarlah "Maklumat Pemerintah", terbentuknya organisasi ketentaraan yang bernama "Tentara Keamanan Rakyat /TKR", serta mengangkat Supriyadi, bekas Komando Pleton PETA yang terkenal dalam pemberontakan melawan Jepang di Blitar pada Pebruari 1945, menjadi Menteri Keamanan Rakyat (AH. Nasution, dalam Yahya Muhaimin,2002:25). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar. Namun setidaknya-tidaknya statusnya sudah meningkat menjadi tentara (Ulf Sundhaussen,1986:13).

Pada tanggal 20 Oktober 1945 pemerintah melakukan pengangkatan-pengangkatan dalam lingkungan Kementerian Keamanan Rakyat sebagai berikut: Muhammad Sulyoadikusumo (bekas Komandan Batalyon atau Daidan-co tentara PETA dahulu) diangkat selaku Menteri Ad Interim Supriyadi (sejak pemberontakan PETA, Supriyadi belum diketahui keberadaannya) diangkat pemimpin tertinggi TKR dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR (Nugroho Notosusanto, dalam Muhaimin,2002:27). Letnan Jendral Urip Sumoharjo berhasil membentuk Markas Tinggi TKR yang berkedudukan di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi (Jawa-Madura 10 divisi, dan Sumatera 6 divisi).

Pada tanggal 1 Januari 1946 pemerintah mengubah TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Namun tanggal 26 Januari 1946 muncul lagi maklumat pemerintah yang mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) serta menjelaskan bahwa TRI bersifat kebangsaan (nasional) yang merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Dalam rangka menciptakan kesatuan pimpinan militer, tanggal 26 Juni 1946 pemerintah mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI, sebelumnya ia menjadi panglima TKR dalam Konperensi TKR di Yogyakarta pada 18 Desember 1945.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya

menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru yang diusulkan tersebut. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang “KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN”.

Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensial menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48)

Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensial dengan kabinet Ministeriil segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Pebruari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:34) :

- 1) Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self-goverment* di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
- 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda.
- 3) Sebelum dibentuk *commonwealth*, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.
- 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pada perkembangannya timbul perbedaan pendapat antara elemen bangsa dalam menghadapi situasi di Indonesia. Pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir dalam menghadapi Belanda lebih memfokuskan pada jalur diplomasi sementara kalangan militer menekankan strategi kekuatan bersenjata. Perbedaan pendapat ini hampir saja menimbulkan perpecahan bangsa dan

melamahkan potensi dalam menghadapi kekuatan asing (Yahya Muhaimin:2002:29).

Sementara itu, tekanan di dalam negeri terhadap kabinet Syahrir semakin meningkat, terutama masalah perundingan dengan Belanda. Pihak oposisi yang dipimpin Tan Malaka menyatakan bahwa kesediaan Syahrir berunding dengan pihak Belanda akan berakibat keruntuhan Republik Indonesia. Tan Malaka membentuk organisasi “Persatuan Perjuangan” yang didukung Muhammad Yamin dan Adam Malik untuk menuntut kemerdekaan 100% sebagai dasar diadakan perundingan dengan Belanda (Ricklefs, 1991:334).

c). Pertentangan Tan Malaka dan Syahrir

Dengan adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya terjadi persaingan antara Syahrir dengan Tan Malaka dalam mendekati kekuasaan Sukarno. Syahrir memperoleh kemenangan dalam pertarungan politik dengan Tan Malaka sehingga ia sebagai satu unsur penting dalam proses pembuatan keputusan dengan cara terciptanya pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir .

Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki agar perundingan dengan Belanda tetap dalam koridor kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional.

Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946, dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai “Pressure Groups” (Yahya Muhaimin. 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh. Yamin. Oposisi Tan Malaka terhadap Perdana Menteri

Syahrir berlanjut dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946.

Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah mencurigai Tan Malaka berkeinginan menduduki pimpinan pemerintahan sehingga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174).

Pada tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan pidato di Yogyakarta yang mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah dalam berdiplomasi dengan Belanda. Namun sikap pemerintah tersebut dilawan oleh oposisi yang berusaha tetap pada pendirian untuk kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Puncak dari perlawanan oposisi adalah ketika Syahrir dalam perjalanan singgah di Solo atau Surakarta dari keliling Jawa Timur di tangkap satuan-satuan militer dari Surakarta. Akhirnya gerakan Tan Malaka tersebut menculik Perdana Menteri Syahrir di Solo yang merupakan basis pertahanan Divisi IV.

Penculikan terhadap Syahrir tersebut sebagai strategi kelompok pro-Tan Malaka agar Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai Perdana Menteri menggantikan Syahrir. Penculikan terhadap Syahrir berlangsung tidak lama

karena ia segera dibebaskan berkat upaya-upaya Sukarno. Konflik internal ini memaksa Presiden pada tanggal 6 Juni 1946 menyatakan “Keadaan Bahaya” yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pemerintah membentuk DPN (Dewan Pertahanan Nasional) dengan maksud untuk mengkoordinasikan kebijakan dari Pemerintahan sipil dan kalangan militer. Akhirnya pemerintah menangkap pihak oposisi yang dianggap membahayakan negara termasuk Adam Malik meski Muhammad Yamin berhasil lolos. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuan-satuan tentara pendukung oposisi membebaskannya dari penjara dan mengirim delegasi kepada Sukarno di Yogyakarta agar kabinet dibubarkan dan menunjuk Jenderal Sudirman untuk mengurus keamanan. Namun delegasi tersebut ditangkap oleh pemerintah. Tan Malaka yang berada dipenjara tetap dianggap oleh pemerintah menggerakkan oposisi dari balik penjara sehingga muncul peristiwa 3 Juli tersebut.

Situasi ini berkembang semakin kritis dan membahayakan keutuhan RI karena terancam perang saudara sehingga akhirnya Jenderal Sudirman mengambil kebijakan untuk mencegah adanya perang saudara karena terdapat indikasi jika Belanda sedang melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menguasai Indonesia kembali. Akhirnya Jenderal Sudirman menyatakan dukungannya kepada pemerintah dan menentang aksi Persatuan Perjuangan (Yahya Muhaimin 2002:50).

Sikap dan tindakan Sukarno dalam hubungannya dengan peristiwa 3 Juli sangat mendua. Dia mengecam keras penculikan atas Perdana Menteri Syahrir dan mengimbau agar Syahrir dibebaskan. Tetapi sesudahnya, Sukarno tidak mengizinkan lagi Syahrir memegang kembali jabatannya, melainkan Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Pertahanan Nasional yang ia ketuai sendiri dan Jenderal Sudirman duduk sebagai anggota. Selain itu, Sukarno tidak bersedia memberi teguran kepada Jenderal Sudirman yang jelas-jelas bertindak melampaui batas dengan melibatkan tentara mendukung PP atau Persatuan Perjuangan (Ulf Sundhaussen,1986:57). Namun sikap Sukarno tersebut sebagai upaya jalan tengah mengatasi krisis internal agar tidak berlarut-larut yang berakibat merugikan bagi perjuangan menghadapi kekuatan asing.

Peristiwa 3 Juli sebagai klimaks dari perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah melawan pemerintah RI yang dianggap akan berkompromi dengan kekuatan asing. Pihak penentang

pemerintah berpegang teguh pada pendirian untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kabinet Syahrir yang Ketiga tetap melanjutkan kebijakan berunding dengan Belanda dan menjelang bulan November 1946 menelurkan sebuah kesepakatan yang nanti disebut Perjanjian Linggarjati.

d). Perjanjian Linggarjati

Pertentangan Indonesia-Belanda belum dapat diselesaikan disebabkan belum adanya titik temu antara keduanya. Namun pertentangan tersebut dicoba diselesaikan terus melalui jalur diplomasi. Pada tanggal 17 November 1945 diadakan perundingan di Jakarta antara Sutan Syahrir (Indonesia) dan Van Mook (Belanda). Indonesia tetap pada pendiriannya yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sebaliknya, Belanda menginginkan adanya Gemenebest Indonesia (Commonwealth) yang kelak menjadi Sekutu dalam kerajaan Belanda dengan Wakil Mahkota Belanda sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini merupakan usul Pemerintah Belanda melalui Van Mook tanggal 10 Pebruari 1946 (Nyoman Deker,1980 42-43).

Pihak Belanda berusaha melakukan tekanan politik kepada Indonesia dengan membentuk kekuasaan di beberapa tempat dengan menggunakan pemerintahan boneka yang dibantu oleh orang Indonesia sendiri namun anti Republik. Pusat pemerintahan boneka tersebut antara lain di Malino, Sulawesi. Pembentukan Pemerintahan Boneka Belanda dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Desember 1946 yang dipimpin oleh Dr. H.J. van Mook dengan menunjuk Sukawati sebagai presiden untuk Indonesia Timur. Tekanan politik terhadap pemerintah RI dimulai dengan menyelenggarakan beberapa konferensi dengan tujuan membentuk “negara” di wilayah Indonesia.

Agar permasalahan Indonesia-Belanda tidak berlarut-larut, Presiden Sukarno meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk menerima kesepakatan Linggarjati meskipun perjanjian tersebut lebih menguntungkan Belanda. Dalam rangka memperbesar peluang agar KNIP menyetujui dan mengesahkan Perjanjian Linggarjati maka jumlah anggota komite tersebut diperbesar jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang dengan memasukkan tokoh-tokoh pro-pemerintah. Meski demikian, pengesahan dari KNIP tidak berjalan mulus sehingga Sukarno dan Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya jika persetujuan dan pengesahan ini dihambat dan akhirnya KNIP meratifikasi persetujuan Linggarjati (Ricklefs, 2005:452). Demikian akhirnya persetujuan

Linggarjati ditandatangani di istana Rijswijk (sekarang Istana Agung) pada tanggal 25 Maret 1947, oleh delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Asas-asas Persetujuan Linggarjati (Ide Anak, 1991:39-40):

- 1) Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI sebagai *de facto* menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera
- 2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokrasi dan federal
- 3) Wilayah Negara Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.
- 4) Bagian-bagian NIS adalah: daerah Republik, Kalimantan, dan Indonesia Timur
- 5) UUD Negara Indonesia Serikat akan ditetapkan oleh suatu sidang konstituante, yang akan dibentuk dan terdiri utusan RI dan daerah lain.
- 6) Pemerintah Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia–Belanda.
- 7) Uni Indonesia-Belanda dikepalai oleh Raja Belanda
- 8) Setelah terbentuknya Unil Indonesia-Belanda, maka Negara Indonesia serikat akan diterima sebagai anggota PBB

Namun Kabinet Syahrir ketiga mengundurkan diri yang disebabkan adanya banyak tekanan karena menandatangani Perjanjian Linggarjati. Presiden Sukarno menunjuk Amir Syarifudin sebagai Formatur Kabinet. Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan membentuk kabinet baru dengan personel inti dari PNI dan partai-patai beralirkan kiri. Setelah pengunduran diri kabinet Syahrir, Van Mook berencana melakukan aksi militer terhadap Indonesia. Apalagi Perdana Menteri Amir Syarifudin mengumumkan bahwa Ia tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Belanda agar mengumumkan suatu penghentian tembak-menembak sebelum suatu persetujuan politik tercapai (Ide Anak, 1991:46). Pernyataan tersebut dianggap oleh delegasi Belanda sebagai hal yang tidak memuaskan bagi perkembangan hubungan diplomasi antara Indonesia-Belanda. Akhirnya Belanda membatalkan secara sepihak perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militernya.

e) Agresi Militer I

Ketentuan-ketentuan antara Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian Linggarjati bersifat lemah karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kedua pihak. Menjelang Mei 1947 Linggarjati sudah tidak mempunyai arti lagi, karena kerja-sama antara Indonesia-Belanda tak mungkin dilaksanakan (Ulf Sundhaussen, 1986:59). Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menghapuskan gencatan senjata yang ada, secara sepihak dan tidak terikat dengan Linggarjati. Belanda memulai aksi militernya dalam waktu singkat berhasil menerobos pertahanan TNI. Belanda menyebut agresi ini sebagai “Aksi Polisionil” , dengan alasan bahwa seluruh Indonesia adalah wilayah kekuasaannya yang utuh setelah membatalkan Perjanjian Linggarjati (Nyoman Dekker, 1980:55).

Belanda mengatakan bahwa tindakannya sebagai “Aksi Polisionil” (dalam bahasa Belanda : *politieactie*), sementara bagi pemerintah RI, aksi tersebut bukanlah aksi polisionil atau aksi kepolisian dengan alasan-alasan sebagai berikut : pertama, gerakan tersebut berasal dari kebijakan seluruh pemerintah Belanda dengan tentara atau militer sebagai inti gerakan. Kedua, gerakan dari Belanda tersebut termasuk gerakan militer. Ketiga, Belanda tidak berhak mengadakan aksi kepolisian di Indonesia karena Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat serta pemerintah Belanda juga telah mengakui kekuasaan *de facto* atas wilayah Jawa dan Sumatera dalam Perjanjian Linggarjati ((Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:66).

Belanda melakukan “aksi polisionil” dengan melancarkan serangan ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan menyerang Surabaya dengan tujuan menduduki Madura dan Ujung Timur, sehingga pasukan Belanda menguasai semua pelabuhan besar di Jawa. Sementara di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan dan Padang juga diamankan. Garis depan pertahanan Republik dapat ditembus, dalam kurun dua minggu divisi-divisi di Jawa Timur dipukul mundur pasukan Belanda. Di Sumatra, Belanda memperluas daerah kekuasaannya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan di Jawa Barat dalam waktu relatif singkat kota-kota penting dapat diduduki serta jalur-jalur komunikasi dapat direbut .

Nasution yang sebelumnya berhasil membentuk sebuah Staf Pertahanan Jawa Barat yang membawahi pasukan-pasukan dan kelompok-kelompok bersenjata di Jawa Barat, menghindari serangan secara langsung dengan

pasukan Belanda yang dari segi teknik dan senjata lebih unggul. Nasution memerintahkan pada pasukannya untuk melancarkan serangan gerilya. Belanda gagal mencapai tujuan untuk menghancurkan RI dengan terlebih dahulu memusnahkan kekuatan TNI.

Agresi Belanda ini difokuskan di Jawa dan Sumatera yang menurut perjanjian Linggarjati, diakui secara *de facto* sebagai wilayah Indonesia dengan tujuan menduduki kota-kota besar dan daerah-daerah yang penting serta mempersempit wilayah RI. Agresi tersebut direncanakan dalam rangka pelaksanaan ide terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

Agresi Belanda I tersebut menimbulkan reaksi dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah tersebut segera dibicarakan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia diundang untuk memberi keterangan di hadapan Dewan Keamanan. Hal ini berarti bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang sederajat dengan Belanda. Belanda melalui wakilnya Van Kleffens menolak usul tersebut. Menurut Belanda, RI tidak memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak dapat dianggap sebagai negara tersendiri. Namun alasan Belanda tersebut dibantah oleh pemerintah India, Australia dan Syiria karena dalam perjanjian Linggarjati Belanda telah mengakui *de facto* berdirinya RI (Nyoman Dekker, 1980:56). Hal ini diperkuat dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara Timur Tengah pasca perjanjian Linggarjati.

Propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Agresi Belanda I sebagai persoalan dalam negeri Belanda tidak mendapat respon dunia internasional disebabkan antara lain pengakuan *de jure* atas kemerdekaan RI dari dunia internasional tersebut. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi dari USA bahwa untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui perantara Komisi Jasa-jasa Baik (di Indonesia dikenal dengan KTN) yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara. Dalam hal ini Belanda dan Indonesia menunjuk masing-masing satu negara dan bersama-sama menunjuk negara ketiga lainnya untuk membentuk komisi tersebut (Ide Anak, 1991:48). Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota KTN, Belanda memilih Belgia dan kedua negara yang terpilih tersebut memilih USA. Australia diwakili Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeeland, USA diwakili Frank Graham. Hasil dari perundingan KTN tersebut adalah perjanjian Renville.

f). Perjanjian Renville

Sebagai hasil kompromi diplomasi yang diprakarsai KTN maka kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Amir Syarifudin menyusun delegasi untuk menghadapi perundingan Indonesia-Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifudin sementara Belanda dipimpin R. Abdul Kadir Widjoatmojo.

KTN mengambil jalan tengah agar perundingan kedua belah pihak di tempat netral yaitu di atas sebuah kapal USA yaitu kapal Angkatan Laut USA USS Renville, sehingga perundingan tersebut disebut perundingan Renville. Sebelumnya dibentuk komisi tehnik untuk melaksanakan gencatan senjata. Dalam perundingan komisi tehnik tersebut Belanda tetap menuntut dipertahankan garis Van Mook yakni garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan wilayah-wilayah yang diklaim milik Belanda.

Didalam perundingan tersebut delegasi Belanda diketuai oleh orang Indonesia dengan tujuan memberi kesan kepada dunia internasional bahwa orang-orang Indonesia menghendaki Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Salah satu pokok terpenting didalam pembicaraan tersebut mengenai penghentian permusuhan, karena tanpa suatu gencatan senjata sulit tercapai kesepakatan politik. Sementara itu kedua pihak tetap berbeda pendapat tentang garis demarkasi. Pihak Belanda berpendapat bahwa Garis Demarkasi adalah Garis Van MOOK yaitu garis yang menghubungkan pos-pos militer Belanda terdepan merupakan batas wilayah yang dikuasai Belanda. Pemerintah RI tidak mengakui Garis Van Mook, karena pasukan-pasukan Indonesia merupakan kesatuan yang utuh yang beroperasi didalam garis-garis tersebut (Ide Anak, 1991:63).

Pada bulan Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru dikapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Perstujuan ini antara lain mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut Garis Van Mook, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda meskipun tetap banyak daerah yang dikuasai pihak RI di belakangnya. Persetujuan ini merupakan kemenangan besar pihak Belanda dalam masalah diplomasi (Ricklefs, 1991: 340).

Setelah persetujuan Renville maka pemerintah Belanda bertindak semakin jauh dalam mengurus urusan internal Indonesia. Belanda membentuk BFO (Bijeenkomst Federal Overleg) atau Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal,

yang terdiri dari negara-negara federal ciptaan Belanda. Ketua BFO adalah Mr. Tengku Bahriun kemudian sejak Januari 1949 diganti Sultan Hamid II. BFO merupakan boneka Belanda didalam menghadapi RI sehingga didalam perkembangan politik Indonesia terdapat tiga pihak yaitu Belanda, RI dan BFO.

g). Agresi Militer II

Setelah pemberontakan PKI Madiun, kedudukan PKI dalam KNIP menjadi beku meski pemerintah tidak secara tegas membubarkan partai tersebut. Setelah fakumnya PKI, terdapat kaum kiri dari garis pemikiran Tan Malaka yang menjadi “penyeimbang” pemerintah. Kelompok ini ternyata menentang pemberontakan PKI Madiun. Golongan ini akhirnya membentuk partai Murba yang menganjurkan pada pemerintah agar membentuk pemerintahan berdasarkan “Triple Platform” yaitu kabinet yang kekuatannya atas golongan agama, nasionalis dengan sosialis dengan tujuan memperoleh tenaga dan dukungan rakyat. Posisi kabinet Hatta menguat sejak kegiatan partai-partai meredup pasca pemberontakan PKI Madiun.

Setelah pemerintah RI dapat mengatasi pemberontakan PKI Madiun, Pemerintah Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi oleh perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Dampak dari pemberontakan PKI Madiun yang memperlemah kekuatan RI dimanfaatkan Pemerintah Belanda untuk menguasai RI. Apalagi kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat sejak adanya Perjanjian Renville. Sementara itu, pihak Belanda beralasan bahwa pembatalan hasil persetujuan Renville di sebabkan pihak Indonesia tidak mentaati isi perjanjian tersebut.

Pada tanggal 18 Desember Belanda melancarkan agresi militer II dan pada tanggal 19 Desember 1948 ibukota RI Yogyakarta dengan mudah dikuasainya. Para pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan mengecam agresi tersebut sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan dalam bidang diplomatik (Rickefs, 1991:347).

Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI yang tetap tinggal di ibu kota, yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, Mr. Assaat (ketua BP-KNIP), Agus Salim (menteri luar negeri), Sutan Syahrir dan Ali Sastroamidjojo. Namun sebelumnya diadakan sidang kabinet dengan keputusan bahwa mereka tetap tinggal di ibu kota dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat

Republik Indonesia) di Sumatra. Namun keputusan kabinet tersebut tidak didukung oleh para perwira militer seperti Jenderal Sudirman dan T.B Simatupang.

Sementara itu, dengan dasar pertimbangan “berhubung dengan ditawannya pemimpin-pemimpin RI “ dan “ untuk “Segera dapat mengisi kevakuman pemerintahan sipil”, Panglima Tentaar Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H Nasution mengeluarkan maklumat no. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat “total”, yaitu menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankam Rata). Menghadapi sistem dan taktik gerilya ini, Belanda merasa mendapat tekanan-tekanan dari pasukan RI. Divisi I Siliwangi yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan ke daerah-daerah yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formal yang ditetapkan di dalam perjanjian Renville (Yahya Muhaimin, 2002:63).

Dengan siasat Belanda menduduki ibukota dan menangkap para pemimpin RI, semula Belanda beranggapan bahwa pangkal kemenangan akan diperoleh dengan siasat ini, namun perhitungan yang salah ini telah menimbulkan titik balik bagi eksistensi pemerintah RI. Dengan keberhasilan serangan pasukan RI terutama kejadian serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta, dunia internasional menyadari bahwa RI tetap eksis dan pihak TNI tetap utuh sehingga berbeda dengan diinformasikan Belanda di forum PBB. Pada tanggal 28 Januari 1949, sidang darurat Dewan Keamanan PBB menerima suatu resolusi yang mendesak kepada Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata.

KTN (Komisi Tiga Negara) diganti dengan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang bertugas sebagai wakil Dewan Keamanan di Indonesia untuk menjalankan tugasnya. Atas bantuan UNCI yang diketuai Cochran (USA) tercapailah Roem-Royen Statement pada tanggal 17 Mei 1949.

h). Persetujuan Roem- Royen

Setelah Agresi II, PBB dan Amerika Serikat mulai mengambil sikap tegas terhadap Belanda. Tekanan ini bersamaan dengan tekanan militer Indonesia sehingga memaksa Belanda memutuskan usahanya untuk membentuk imperium di Indonesia (Ricklefs,349). Disamping itu, Amerika mengancam kepada Belanda untuk mencabut bantuan Marshall Plan, agar menerima KMB yang bermuara

pada pengakuan kedaulatan negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia-Belanda (Nugroho Notosusanto,1977:63).

Menunjuk pada instruksi Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949, maka pada tanggal 26 Maret 1949 Komisi PBB untuk Indonesia mengundang kedua ketua delegasi Indonesia dan Belanda dalam rangka memulai pembicaraan-pembicaraan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Komisi ini sebagai wakil PBB akan memberikan bantuan dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda secara adil dan damai.

Pada tanggal 14 April 1949 konferensi persiapan dibuka di Jakarta yang diketuai Komisi PBB untuk Indonesia Merle Cochran. Dalam kesempatan tersebut ia mengemukakan tujuan dari pertemuan tersebut antara lain tercapainya resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, setelah itu membahas syarat-syarat KMB yang akan diselenggarakan di Den Haag. Perundingan diadakan di hotel Des Indes Jakarta, delegasi Indonesia diketuai Moh Roem dan wakil ketua Ali Sastroamijoyo dengan anggota J. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Supomo dan Latuharhary. Delegasi Belanda dipimpin Dr. J.H van Royen dengan anggota Mr. N.S. Blom, A.S Jacub, J.J van Velde. Kesepakatan Roem-Royen juga didukung oleh parlemen Indonesia karena partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan langkah ke arah penyelesaian konflik Indonesia-Belanda(Nugroho Notosusanto,1977: 69).

Ternyata persetujuan Roem Royen yang diambil oleh politisi sipil Indonesia dan pemimpin negara kurang disetujui oleh kalangan militer termasuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Sikap PDRI yang belum menerima persetujuan Roem Royen menyulitkan pimpinan negara dan pemerintahan di dalam pelaksanaan persetujuan tersebut. Sebabnya adalah: pertama ,PDRI adalah pemegang kekuasaan negara yang sah dan yang mengendalikan perjuangan RI sejak peristiwa Agresi II; kedua, PDRI mendapat dukungan dari kalangan militer Indonesia (Yahya Muhaimin,2002:67).

Setelah diadakan kontak antara PDRI yang didukung TNI dengan para pemimpin RI, akhirnya tercapai kesepakatan. Tanggal 6 Juli 1949 Sukarno-Hatta serta pemimpin lainnya kembali ke ibukota Yogyakarta dan pada sidang kabinet tanggal 13 Juli 1949, Syarifudin Prawiranegara selaku ketua PDRI menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Ketika tercapai kesepakatan gencatan

senjata antara Indonesia dan Belanda, para perwira militer Indonesia tidak menyetujuinya, Panglima Besar Jenderal Sudirman akan mengundurkan diri dari jabatannya bahkan keluar dari dinas kemiliteran. Namun keputusan Jenderal Sudirman melunak ketika Presiden Sukarno juga mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Jenderal Sudirman menyadari akan akibat bagi masa depan bangsa jika ia dan Sukarno mundur dari jabatannya masing-masing.

i) Konferensi Meja Bundar

Konferensi antar-Indonesia merupakan fakta bersejarah bagi bangsa Indonesia yang membahas tentang pokok-pokok dasar berbangsa dan bernegara seperti penertiban ketatanegaraan, asas-asas pokok Peraturan Dasar Uni, hubungan keuangan dan ekonomi dengan Belanda, Pertahanan Negara (Ide Anak, 1991:304). Dengan berhasilnya konferensi inter-Indonesia maka mulailah tahap baru didalam perundingan antar Indonesia-Belanda menuju pada KMB.

Pada tanggal 3 Agustus 1949 Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, Van Maarseveen berpidato di dalam Majelis Rendah Belanda yang memberitahukan bahwa konferensi pendahuluan antar Indonesia Belanda berjalan lancar dengan menghasilkan kesepakatan: (1) dipulihkannya kembali kekuasaan Pemerintah RI di Yogyakarta (2) perintah penghentian tembakan-menembak untuk mengakhiri permusuhan (3) persiapan untuk pelaksanaan KMB.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka dengan resmi dengan suatu sidang lengkap di Bangsal Ksatria (Ridderzaal) Staten Generaal di Lapangan Binnen Hof, Den Haag dengan diawali pidato Perdana Menteri Belanda, Drees. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Belanda berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan kepada RIS akan dilakukan dengan segera dan tidak dapat dicabut kembali namun dengan tiga syarat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: RIS sebagai negara demokratis dengan dasar federal; hak menentukan nasibnya sendiri rakyat Indonesia harus dijamin, kerja sama antar Indonesia dan kerjaan Belanda dapat terbina berupa ikatan UNI, yang dibentuk berdasarkan suka rela antar dua negara yang sama kedudukannya.

Delegasi Indonesia dalam KMB adalah Moh. Hatta (ketua), Moh. Roem, Prof. Supomo, J. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Sujono

Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, T.B Simatupang, Sumardi sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid dari Pontianak. Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarseven dan UNCI sebagai wakil dari Dewan Keamanan PBB dipimpin Marle Cochran.

Dalam konferensi ini dibentuk komisi-komisi antara lain: komisi ketatanegaraan, keuangan, militer. Pembicaraan yang tersulit adalah dalam komisi ketatanegaraan, khususnya yang menyangkut masalah Irian Barat. Untuk mengambil jalan tengah mengenai kasus Irian maka disepakati suatu klausul mengenai hal itu. Dalam klausul tersebut ditentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah Penyerahan Kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat akan dirundingkan kembali untuk pengembalian secara de facto kepada Indonesia dan untuk sementara waktu, Irian Barat masih berada dibawah kekuasaan Belanda (Nyoman Dekker, 1980:83-84)

Para Wakil Indonesia dalam KMB berusaha secepatnya memperoleh pengakuan kedaulatan sehingga bersedia menerima penundaan penyerahan atas Irian Barat. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran jika pembicaraan masalah Irian Barat berlarut-larut akan menimbulkan komplikasi yang menghambat pelaksanaan penyerahan kedaulatan (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:115).

Dalam KBM juga disepakati bahwa inti Angkatan Perang dalam Indonesia Serikat, TNI dan KNIL (tentara Belanda di Indonesia) setelah terjadi Penyerahan Kedaulatan akan dilebur di dalam TNI. Sementara itu, permasalahan keuangan menjadi beban berat bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan pihak Belanda menuntut agar Indonesia mengakui hutangnya kepada Belanda tidak hanya sampai kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 namun sampai penyerahan kedaulatan tahun 1949.

Pada tanggal 3 Nopember 1949 KMB menyelesaikan konferensinya. Hasil-hasilnya diajukan pemerintah Indonesia kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang mengadakan sidang tanggal 6-14 Desember 1949 berhasil menerima hasil KMB dengan suara mayoritas. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS, terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS pertama terbentuk dipimpin oleh Moh. Hatta.

Pada tanggal 23 Desember delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan di Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, Ratu Yuliana, Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Menteri seberang Lautan A.M.J.A Sassen dan ketua delegasi Indonesia Muhammad Hatta menandatangani naskah penyerahan kedaulatan terhadap RIS. Pada saat bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Dan sejak itu, Belanda secara formal mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, kecuali Irian Barat (Nugroho Notosusanto, 1977:72).

Meskipun demikian, upaya Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya dijalankan. Disamping masalah Irian Barat, pemerintah Belanda berada di belakang gerakan-gerakan pengacau ketika pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling beserta anak buahnya merebut tempat-tempat penting di Bandung bahkan berencana membunuh beberapa menteri RIS. Beberapa pemimpin negara Pasundan terindikasi terlibat dalam gerakan Westerling sehingga parlemen negara bagian Pasundan mengusulkan agar negara Pasundan dibubarkan (Ricklefs, 1991:351). Gerakan Westerling tidak berlangsung lama hanya bersifat insidental dan akhirnya ia kembali ke Belanda. Ditangkapnya beberapa pemimpin negara Pasundan karena dicurigai terlibat dalam komplotan Westerling, mendorong parlemen negara bagian tersebut meminta agar Pasundan dibubarkan. Sebagian besar negara bagian yang kecil mengikuti contoh Pasundan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia (Ricklefs, 2005:466).

Sultan Abdul Hamid II dari Kalimantan Barat juga mendukung gerakan Westerling. Akhirnya beberapa negara federal memutuskan untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun upaya pembubaran negara federal ini ditentang oleh Indonesia Timur yang pro Belanda. Mereka berpendapat bahwa RI sebagai negara yang didominasi oleh suku Jawa dan mayoritas Muslim sehingga berbeda dengan ciri khas dari Negara Indonesia Timur. Namun terdapat usaha keras dari berbagai elemen bangsa untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah

di Indonesia termasuk Indonesia Timur ke dalam sebuah negara Kesatuan Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 25 April 1950 mantan Menteri Kehakiman dalam pemerintah Indonesia Timur yaitu Dr. Soumokil, memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Namun gerakan tersebut juga dapat dengan mudah ditumpas dan negara-negara federal lainnya memutuskan untuk menyatukan diri ke dalam NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950.

j). Hubungan Pusat dan Daerah

Dengan persetujuan KMB maka terbentuklah negara RIS. RIS yang terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Diantara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia adalah Negara Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan kembali kepada bentuk negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Didalam negara RIS atau federal sejak lama timbul semangat masyarakat dan rakyat untuk bersatu sehingga RIS tidak dapat bertahan lama.

Dalam perkembangannya muncul rasa tidak puas, dikalangan penduduk luar Jawa tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan para pemimpin Indonesia. Pemerintah pusat dianggap bersifat sentralistik dan hanya berorientasi pada pusat pemerintahan Jakarta dan kepentingan masyarakat Jawa (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:151).

Masyarakat yang tinggal di daerah penghasil devisa negara, seperti Sumatera Utara melalui ekspor hasil perkebunan dan Sulawesi Utara melalui ekspor kopra, menganggap bahwa hasil ekspor lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pusat dibanding daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusat menolak anggapan itu, karena sebagai penyelenggara pemerintahan di pusat maka berkewajiban untuk meratakan pendapat negara di setiap daerah meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pada bulan Mei 1956, sebagai protes terhadap pemerintah pusat, terjadi penyelundupan-penyelundupan dan perdagangan barter di luar Jawa, terutama di daerah Minahasa, Makasar dan Sumatera Utara. Penyelundupan ini dilakukan atas inisiatif dan perlindungan para penguasa militer setempat, yaitu masing-masing oleh Letnan Kolonel Worang, Letnan Kolonel Andi Mattalata yang

keduanya di bawah kekuasaan Panglima Militer Indonesia Timur Kolonel J.F Warouw, sebelum digantikan Kolonel Ventje Sumual (Yahya Muhaimin,2002:89).

Pada bulan Desember 1956 para perwira militer daerah yang didukung kaum sipil di Sumatera mengambil keputusan untuk melawan pemerintah Pusat . Komandan Resimen di Sumatera Barat mengumumkan pengambilalihan pemerintahan sipil serta pengambilalihan kekuasaan di Sumatera Utara. Panglima Sumatera Selatan juga memaksa gubernur sipil di wilayah tersebut untuk memulai langkah-langkah otonomi (Ricklefs,1991:383).

Kecenderungan sentralistik dari pemerintah pusat akibat dari pengalaman masa lampau, ketika Indonesia sebagai daerah jajahan diperintah juga secara sentralistik. Disamping itu sejak pergantian RIS menjadi ke bentuk negara kesatuan kembali tahun 1950, terdapat kecenderungan para pemimpin RI berusaha menghapus pengaruh federalisme yang berasal dari kolonial. Kecenderungan semacam itu, menimbulkan sikap penyelenggara pemerintah pada paham sentralistik (Sayidiman Suryohadiprojo,1996: 152).

Dewan-dewan militer di Sumatera yang menentang pemerintah pusat,dengan cepat mendapat dukungan rakyat karena melakukan tindakan-tindakan nyata dalam memperbaharui kehidupan rakyat setempat. Hasil-hasil ekspor dari Sumatra Utara, yang meliputi bekas karisidenan Sumatra Timur pada jaman Belanda merupakan daerah yang menghasilkan pendapatan separoh dari devisa negara pada tahun 1956 (Ricklefs,1991:384). Para pemimpin daerah penghasil devisa beranggapan bahwa daerah kurang menikmati hasil ekspor untuk membawa kemajuan bagi daerahnya.

Pandangan pemerintah daerah ini berbeda dengan pemerintah pusat, karena Pemerintah Pusat bertanggung jawab pada semua wilayah di Indonesia termasuk daerah yang kurang menghasilkan devisa dalam rangka pemerataan pembangunan. Ketidakpuasan pemimpin militer di daerah terhadap pemerintah pusat menjurus pada usaha pemberontakan. Situasi ini diperparah ketika terjadi keretakan dalam TNI-AD, yang disebabkan sebuah kasus yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada tanggal 20 Desember 1956 Letnan Kolonel Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng di Sumatra Barat. Dewan Banteng terdiri para tokoh di Sumatra Barat yang pada masa perjuangan kemerdekaan aktif dalam Divisi Banteng yang sekarang bermaksud mempersatukan masyarakat Sumatera Barat

dalam memperjuangkan tujuan daerahnya. Kemudian Kolonel Simbolon juga membentuk Dewan Gajah di Medan tanggal 22 Desember 1956 dan Letnan Kolonel V. Samual membentuk Dewan Manguni di Sulawesi. Peristiwa tersebut juga dipengaruhi pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 karena Muhammad Hatta dianggap sebagai simbol tokoh non Jawa yang duduk di pemerintahan.

Pada tanggal 22 Desember 1956, saat berdirinya Dewan Gajah diumumkan, Sumatra melepaskan diri dari Pemerintah Pusat dan tidak mengakui lagi pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo serta mengambil alih pemerintahan di Sumatra. Pada tanggal 2 Maret 1957 dalam suatu pertemuan di Makasar antara tokoh sipil dan militer di daerah tersebut, dikeluarkan suatu Piagam Perjuangan yang disebut Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein menyatakan berdirinya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Bukittinggi dan gerakan ini mendapat dukungan dari Sulawesi Utara dan Tengah, sehingga meletuslah pemberontakan PRRI/Permesta.

Kepentingan yang bertolak belakang. Hal semacam ini yang akhirnya diselesaikan melalui jalur konfrontasi. Berbagai konfrontasi antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia merupakan reaksi dari tindakan Belanda yang memaksakan kehendaknya. Disamping itu, gangguan keamanan juga berasal dari elemen bangsa Indonesia sendiri sehingga konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kekuatan asing sering terganggu. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo dan Pemberontakan PKI Madiun merupakan bukti dari hal tersebut.

Namun berkat adanya persatuan dan kesatuan antara rakyat, pemerintah dan TNI segala rintangan tersebut dapat diakhiri melalui pengakuan kemerdekaan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia meski tidak menyeluruh karena Irian Barat sebagai wilayah yang tertunda untuk masuk dalam NKRI. Namun dengan adanya dukungan internasional serta kebersamaan antara rakyat dan pemerintah Indonesia, masalah Irian Barat akhirnya juga dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan RI, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna, menggunakan pendekatan andragogi, humanistik dan konstruktivistik.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan.. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.
2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas. Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 6 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya .setiap kelompok mengerjakan semua tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

D. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK I

Tugas Individu

Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana latar belakang TNI pada awalnya menggunakan status BKR, bukan militer!
2. Apa yang anda ketahui tentang Peristiwa 3 Juli 1946?
3. Apa latar belakang Pemberontakan PKI Madiun?
4. Dinamika hubungan Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan tercermin dalam KMB. Mengapa delegasi Indonesia menyetujui hasil KMB?
5. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia membangun ekonomi di awal kemerdekaan?

LK2

Tugas Kelompok

Diskusikan topik-topik di bawah ini:

a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik

Tan Malaka dan Revolusioner

Dengan adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya terjadi persaingan antara Syahrir dengan Tan Malaka dalam mendekati kekuasaan Sukarno. Syahrir memperoleh kemenangan dalam pertarungan politik dengan Tan Malaka sehingga Ia sebagai satu unsur penting dalam proses pembuatan keputusan dengan cara terciptanya pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir .

Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki agar perundingan dengan Belanda tetap dalam koridor kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional.

Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946, dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai "*Pressure Groups*" (Yahya Muhaimin, 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh. Yamin. Oposisi Tan Malaka terhadap Perdana Menteri Syahrir berlanjut dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946.

Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan berharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah mencurigai Tan Malaka berkeinginan menduduki pimpinan pemerintahan sehingga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174).

b. Masalah yang didiskusikan!

1. Bagaimana pendapat anda, tentang sepak terjang Tan Malaka berdasar wacana di atas?
2. Mengapa Tan Malaka mendapat dukungan dari TNI?

F. RANGKUMAN

Materi tentang Usaha Mempertahankan Kemerdekaan merupakan penjelasan dari peristiwa sejarah yang terkait dengan masa awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini berhubungan dengan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah jajahannya yang terlepas akibat pendudukan Jepang di Asia termasuk Indonesia. Pasca Perang Dunia II, dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, maka daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang mengalami *vakum of power*.

Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk memerdekakan diri. Namun, Belanda berusaha menganulir kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Belanda dalam melanjutkan paham imperialis dan kolonialisnya. Agresi Militer Belanda I dan II sebagai cara radikal untuk kembali pada pemaksaan politik untuk berkuasa di Indonesia.

Dalam menjalankan misi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mengupayakan terlebih dahulu jalur diplomasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini secara substansi sangat merugikan pemerintah Indonesia. Namun ini sebagai awal bagi pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia meski pada kedaulatan wilayah yang terbatas. Namun Belanda kurang puas dengan isi Linggarjati meski lebih menguntungkan mereka. Akhirnya ditempuhlah upaya konflik dengan melakukan Agresi Militer I di Indonesia.

Konflik yang disebabkan oleh Agresi ini mengundang perhatian dunia sehingga tekanan dunia internasional mendesak Belanda kembali ke meja perundingan. Maka tercapainya Perjanjian Renville yang semakin merugikan pihak Indonesia. Ketua delegasi Indonesia, Amir Syarifuddin dipersalahkan atas persetujuannya ini, sehingga pemerintahannya jatuh. Amir Syarifuddin merasa dikecewakan atas apa yang ia alami sehingga akhirnya menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan Pemberontakan PKI Madiun. Konflik internal dari pemberontakan PKI Madiun ini, dimanfaatkan Belanda untuk melakukan Agresi

Militer II. Namun tindakan Belanda ini merupakan titik balik dari posisinya di mata dunia internasional dan sebaliknya menguntungkan posisi Indonesia. Hal diperkuat ketika rakyat dan militer Indonesia dapat menunjukkan perlawanannya dengan perang gerilya.

Akhirnya , Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB meski pengakuan kemerdekaan itu dengan syarat–syarat tertentu. Dalam perjalanan waktu, Indonesia dapat melepaskan segala pengaruh politik Belanda termasuk masalah Irian Barat.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan RI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?
3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

MASA PEMERINTAHAN SUKARNO DAN SOEHARTO

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat dapat menunjukkan sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin pada masa Sukarno serta perkembangan pemerintahan Orde Baru, tumbangnya Orde Baru dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan pelaksanaan Demokrasi Parlementer di Indonesia
2. Menganalisis pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia
3. Menganalisis pemerintahan Orde Baru, dan tumbangnya Orde Baru

C. URAIAN MATERI

Diantara perjalanan politik bangsa ini pasca kemerdekaan yang paling menonjol adalah sekitar peristiwa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Pemberontakan G-30/S yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai kronologi sejarah yang saling berkaitan erat antara satu dengan peristiwa lainnya. Demokrasi Parlementer di Indonesia antara tahun 1950-1959 mengakibatkan sistem pemerintahan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan, parlemen mempunyai peran yang sentral dalam menentukan kebijakan negara. Namun diantara partai-partai politik yang ada terdapat persaingan yang menjurus pada perpecahan yang berakibat terpuruknya perjalanan nasib bangsa. Hanya dalam waktu sembilan tahun, Indonesia telah berganti sekitar tujuh kabinet atau pemerintahan. Kabinet sering kali mendapat mosi tidak percaya dari lawan-lawan politiknya di parlemen. Jatuh banggunya kabinet ini, mencapai puncaknya ketika Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang diberi tugas membuat UUD gagal melaksanakan tugasnya. Kegagalan ini disebabkan perbedaan ideologi dan prinsip partai dalam

menentukan dasar negara. Sebagai jalan keluar mengatasi krisis ini, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan adanya Dekrit Presiden, diharapkan permasalahan akan dapat terselesaikan. Dekrit Presiden pada akhirnya melahirkan sistem Demokrasi Terpimpin. Sebenarnya konsep demokrasi ini sebagai sesuatu yang baik dalam rangka menyelesaikan konflik di pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan–penyimpangan kebijakan yang dilakukan presiden terhadap aturan ketatanegaraan. Presiden menjadi kekuatan tunggal yang menjurus pada tindakan otoriter. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat dua kekuatan yang menonjol dan saling berebut pengaruh yaitu PKI dan Militer, khususnya TNI-AD.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, satu-satunya partai yang menonjol adalah PKI. Setelah gagal dalam pemberontakan di Madiun 1948, PKI menjadi kekuatan besar. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pemilu I, PKI menjadi salah satu pemenangnya. Setelah Partai Masyumi dibubarkan sekitar tahun 1960, tidak ada kekuatan penyeimbang bagi PKI untuk mengontrol gerak dan kebijakannya. Apalagi Presiden Sukarno akhirnya lebih dekat dengan negara-negara berhaluan komunis.

Peristiwa klimak dari permasalahan diatas, ketika pada tahun 1965 muncul usaha kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya tujuh jenderal dari TNI–AD yang anti PKI tersebut, digerakkan oleh PKI meski sampai sekarang masih terdapat kontroversi tentang hal itu. Kegagalan PKI dalam merebut dominasi pemerintahan mengakibatkannya menjadi *common enemy* atau musuh bersama bagi elemen masyarakat sehingga muncul pembantaian besar–besaran terhadap anggota PKI dan keluarganya. Kemudian lahirlah Orde Baru sebagai pemerintahan baru yang didominasi oleh kekuatan militer yang dipimpin Jenderal Suharto. Namun Orde Baru setelah memerintah sekitar 32 tahun , pada akhirnya ditumbangkan oleh demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa.

a. Demokrasi Parlementer di Indonesia

1) Latar Belakang Demokrasi Liberal

Setelah kesepakatan diplomasi antara Indonesia-Belanda, melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag tanggal 2 November 1945 serta

ditindaklanjuti dengan pengakuan kedaulatan atas Indonesia dari pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 maka konstitusi resmi Indonesia adalah UUD RIS. Konstitusi tersebut sebagai jalan kompromi bagi kelancaran penyerahan kedaulatan Indonesia, yang bermakna: *“Dengan berlakunya UUD RIS tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer atau liberal dengan bentuk negara federasi atau serikat (Nugroho Notosusanto, 1977:72). Sementara itu menurut praktek ketatanegaraan berlakunya sistem demokrasi liberal di Indonesia dimulai saat berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang menggantikan bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950” (Mahfud M D, 2000:49).*

Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan kepala negara atau presiden pertama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem kabinetnya *Zaken Kabinet* yaitu suatu pemerintahan yang menteri-menterinya diutamakan dari keahliannya dan bukan bersandar pada kekuatan partai politik. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS merupakan strategi diplomasi Belanda untuk dapat bertahan di Indonesia. Setelah RIS diganti UUD Sementara maka Indonesia menganut sistem parlementer secara konstitusional serta sistem multi partai seperti yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1945-1949.

2) Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan dibuktikan dengan 7 kali kabinet mengalami jatuh bangun yaitu:

a. Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain: Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan perbaikan institusi Angkatan Perang, penyelesaian Irian Barat, mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs, 1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah: Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo), Kegagalan

membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI, Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949).

Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

b) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi. Program kabinet ini adalah: Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif, Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat, Persiapan penyelenggaraan Pemilu I, Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria, Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (*Mutual Security Act*) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia.

c). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953). Program kabinet Wilopo adalah: Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante, DPR dan DPRD), kemakmuran, pendidikan dan keamanan, pelaksanaan politik bebas aktif, pengembalian Irian Barat dalam NKRI. Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah: munculnya gerakan separatis, keadaan perekonomian dan politik belum membaik, persoalan Irian Barat belum selesai, munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara.

Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan PETA dan Laskar–laskar serta Parlemen. Bahkan parlemen mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI menganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng.

Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang mengizinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurus tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.

d). Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953–Juli 1955).

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain: Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi, pelaksanaan perekonomian Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18–25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti

peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utuyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Yahya Muhaimin, 2002:84). Parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang dianggap tidak mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

e) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama (Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut antara lain: pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri Kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan korupsi), pelaksanaan pemilu I

Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu.Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:29 September 1955 memilih anggota DPR, 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

Tabel 1. Hasil Pemilu 1955

Partai	Suara sah	% suara sah	Kursi Parlemen	%Kursi Parlemen
PNI	8.434.654	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katholik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100,0	257	100,0

Sumber: Sejarah Indonesia Modern, M.C Ricklefs, 1991

Kabinet Burhanudin Harahap tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif meskipun tetap condong pada negara-negara Barat. Pada tanggal 13 Pebruari 1956, kabinet mengumumkan secara sepihak untuk memutuskan Uni Indonesia-Belanda hasil dari KMB, karena Belanda menolak melakukan upaya diplomasi lanjutan tentang Irian Barat. Dengan berhasilnya Pemilu I tersebut, tugas Kabinet Burhanudin Harahap dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru hasil dari Pemilu tersebut.

f) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai-partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehingga terdiri atas PNI, Masyumi dan Partai NU. Program kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda sebagai berikut: perjuangan merebut Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonom, pemilihan anggota DPRD, perbaikan nasib buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan Negara, pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Nugroho Notosusanto, 1977:96).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabinet dalam melaksanakan agenda pemerintahan adalah: timbulnya semangat anti Cina di masyarakat, hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah

Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB, penyelundupan barang-barang import, ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi biaya pembangunan antara daerah dan pusat.

Ketidakpuasan daerah-daerah semakin meningkat karena dukungan dari panglima militer di daerah sehingga muncul dewan-dewan di daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Juli 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang disegani oleh Pusat. Dewan Banteng yang diketuai Let.Kol Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera dengan tuntutan kepada pemerintah Pusat agar Muhammad Hatta dikembalikan dalam posisi politik yang dominan dalam pemerintahan. Disamping itu mereka menuntut pembagian alokasi anggaran pembangunan yang proposional antara Pusat dan Daerah.

Pada bulan Oktober 1956 Presiden Sukarno menawarkan jalur alternatif untuk mengatasi krisis politik berupa gagasan Demokrasi Terpimpin. Menurut Sukarno, Demokrasi Terpimpin merupakan sistem musyawarah-mufakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Wacana Demokrasi Terpimpin tersebut menimbulkan perpecahan diparlemen karena partai-partai politik menyambut suara pro dan kontra tentang konsepsi tersebut. Partai Masyumi dan Partai Katholik menentang ide Sukarno tersebut sementara PNI dan PKI mendukungnya.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin juga mendapat tantangan keras dari daerah terutama luar Jawa yaitu Sumatera dan Sulawesi. Krisis politik ini memuncak dengan pengunduran diri Kabinet Ali II. Namun sebelumnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjyo menandatangani dekrit yang menyatakan "Negara dalam keadaan darurat untuk semua wilayah" atau SOB (*State of Siege*). Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Kabinet Djuanda.

g) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)

Kabinet tersebut merupakan *Zaken Kabinet*, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah : membentuk Dewan Nasional, normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan, perjuangan merebut Irian Barat, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB (Nugroho Notosusanto, 1977:98).

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ekstra-konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54).

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon , Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu: Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres, Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti, pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang-undang.

Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner RePublik Indonesia) dengan Perdana Menteriya, Syafrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). PRRI mendapat dukungan dari daerah Sulawesi dengan munculnya gerakan Permesta sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga kabinet Djuanda berakhir.

b. Demokrasi Terpimpin

1) Latar Belakang Dekrit Presiden

Demokrasi Liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ini dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Di samping itu muncul gerakan-gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante.

Dalam pidato tanggal 22 April 1959 di depan Konstituante dengan judul "Res Publica, Sekali Lagi Res Publica", Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif.

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamandemen dengan memasukkan kata-kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga eksistensi politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik.

Kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan

dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

Pertama Menetapkan pembubaran Konstituante; *Kedua*, Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS; *Ketiga* Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya

2) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI, Mahkamah Agung serta sebagian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44).

Pengertian rinci tentang Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Sukarno dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok–pokoknya sebagai berikut (Soepomo Djojowadono, dalam Mahfud MD,2000:550):

- a) Ada rasa tidak puas terhadap hasil–hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh–bangunnya kabinet serta pemberontakan di daerah–daerah.
- b) Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme, pemilihan Demokrasi Liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi

yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi-partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai tersebut digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdian rakyat.

- c) Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu demokrasi yang menuntun untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa, yang beranggotakan orang-orang jujur.
- d) Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
- Mengganti sistem *free fight liberalism* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - Dewan Perancang Nasional akan membuat *blue-print* masyarakat adil dan makmur.
 - Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar *blue print* yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat Konstituante
 - Hendaknya Konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
 - Perlunya penyerdehanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi sistem multi-partai dan menggantikannya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.

Selain itu, Sukarno juga mendefinisikan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun definisi dari Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya sebagai kebijakan alternatif dalam menghadapi perpecahan bangsa namun pada prakteknya menyimpang dari apa yang telah didefinisikan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang diperkuat dengan TAP MPRS No. VII/1965 menjelmakan Presiden Sukarno sebagai penguasa yang mengarah pada kediktatoran.

Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Sukarno membentuk DPA (Dewan Perwakilan Rakyat) serta Dewan Perancang Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin, serta MPRS yang diketuai Chaerul Saleh. Namun Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan parlemen menolak

Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden dan menggantikannya dengan DPR GR(DPR Gotong-Royong). Kemudian Sukarno juga menetapkan MPRS, dimana tokoh PKI D.N Aidit menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tokoh-tokoh Masyumi ,PSI dan Muhammad Hatta menentang kebijakan Sukarno tersebut dengan membentuk Liga Demokrasi.

MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959 tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetapkannya sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”.

Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs,1991:406).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu *pertama* peran dominan Presiden dalam segala aspek, *kedua* pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang, *ketiga* peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial politik (Miriam Budiardjo, 1995:228).

3) Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin

Gagasan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dikembangkan pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, para pemimpin Indonesia melihat konflik dunia yang terpecah menjadi dua yaitu Blok Barat

Liberalis) dan Blok Timur (Komunis). Indonesia berusaha tetap berada diluar kedua blok yang bermusuhan tersebut. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia merupakan bagian dari nasionalisme juga (Herbert Feith, 1995:59).

Pada masa Demokrasi Liberal antara tahun 1950-1957, politik luar negeri Indonesia mulai goyah meskipun kabinet-kabinet pada masa itu mencantumkan program kabinet untuk masalah kebijakan luar negeri tetap dalam kerangka kebijakan bebas aktif. Dalam pelaksanaannya mereka tidak sesuai dengan programnya. Ini dibuktikan dengan jatuhnya kabinet Sukiman tahun 1952, yang disebabkan keputusan politiknya menerima bantuan militer dari Amerika Serikat dalam rangka kesepakatan MSA atau Mutual Security Act.

Dalam perkembangannya, hubungan dengan negara-negara Blok Komunis menjadi lebih dekat dibanding Blok Barat. Faktor-faktor penyebab adalah: a) dampak adanya Konferensi Asia Afrika tentang kebijakan anti Imperialisme kolonialisme (Anti Barat); b) Amerika Serikat terindikasikan mendukung pemderontakan PRRI/Permesta; c) konflik Indonesia-Belanda tentang masalah Irian Barat; d) Belanda akan mendirikan negara Papua, sehingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda; e) hubungan yang dekat antara Sukarno dengan PKI; f) Uni Soviet (Blok Timur) menawarkan bantuan senjata kepada Indonesia, dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sebelumnya Amerika Serikat menolak penjualan senjata ke Indonesia.

Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955 berhasil menumbuhkan kesadaran serta kepercayaan diri pada bangsa-bangsa Asia-Afrika yang telah menjadi wilayah praktek imperialisme-kolonialisme. Pertemuan itu juga menjadi landasan kuat untuk pembentukan Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*) yaitu gerakan dari bangsa-bangsa yang tidak melibatkan diri dalam suasana Perang Dingin. Namun dalam perkembangannya kedekatan Sukarno dan PKI selanjutnya mempengaruhi kebijakan politik luar negeri bebas aktif ke arah Blok Komunis.

Peristiwa-peristiwa yang dapat diidentifikasi sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah: a) adanya poros Jakarta-Peking; b) Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI; c) timbulnya gagasan NEFO (*New Emerging Forces*) sebagai tandingan kekuatan negara-negara Barat (*Old Established Forces*); d) konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).

Konfrontasi dengan Malaysia dilatarbelakangi ketika pada tahun 1961 terdapat rencana pembentukan Negara Federal Malaysia. Pembentukan negara tersebut, yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sabah dan Singapura ditentang oleh Presiden Sukarno. Sukarno menganggap bahwa pembentukan Malaysia sebagai “Proyek Neokolonialisme” (Nekolim) dari Inggris sehingga membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Sebaliknya, Sukarno mendukung berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang diproklamkan di Manila, Philipina oleh A.M Azhari dari Brunei.

Philipina juga menentang pembentukan Negara Malaysia, dengan alasan bahwa secara historis dan yuridis wilayah Sabah yang akan dimasukkan dalam Negara Malaysia adalah milik Sultan Sulu dari Philipina yang disewakan kepada pemerintah Inggris. Akibatnya muncul ketegangan antara Indonesia dan Philipina disatu pihak dengan Persekutuan Tanah Melayu.

Presiden Sukarno berusaha keras menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia tersebut. Untuk melaksanakan kebijakannya dilancarkan konfrontasi bersenjata dengan Malaysia berdasarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat, yakni: perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Para sukarelawan dan TNI berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara untuk melancarkan operasi militer terhadap angkatan perang persemakmuran Inggris. Namun TNI-AD berusaha mencari jalan agar dalam konfrontasi dengan Malaysia tersebut tidak dijadikan oleh PKI sebagai jalan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam strategi politiknya. (Frederick P. Bunnell, dalam Yahya Mahaimin, 2002:181).

Pertemuan antara Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu yang diadakan di Tokyo, Jepang tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963 berhasil meredam ketegangan untuk sementara waktu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Philipina yang menghasilkan pokok-pokok pengertian diantara ketiga negara dalam memecahkan masalah yang timbul. Usaha Indonesia-Malaysia-Philipina dalam rangka meredam konflik antara lain membentuk Maphilindo, singkatan dari Malaysia, Philipina dan Indonesia, dengan maksud untuk persatuan rumpun di Asia Tenggara. Konsep ini merupakan

kesepakatan bersama antara Presiden Sukarno, Presiden Macapagal dari Philipina dan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tengku Abdul Rachman (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:256).

Namun ternyata pada tanggal 9 Juli 1963 di London Inggris, Perdana Menteri Malaysia Abdul Rahman menandatangani dokumen persetujuan dengan pemerintah Inggris mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Hal ini menimbulkan konflik antara Indonesia dengan Malaysia.

Pada tanggal 16 September 1963 ditandatangani Naskah Penggabungan Empat Negara Bagian yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak dan Sabah dalam Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi ini ditentang oleh Indonesia sehingga pada tanggal 17 September 1963 Indonesia secara sepihak mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Pada rapat umum Anti Pangkalan Militer Asing di Jakarta tanggal 7 Januari 1965, Presiden Indonesia menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini merupakan reaksi atas terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

c. Pemerintahan Orde Baru

1) Prakondisi Pemberontakan G-30/S 1965

Manifesto Politik yang telah ditetapkan MPRS sebagai GBHN ternyata tidak hanya berlaku 5 tahun tetapi untuk waktu tanpa batas. Pada masa itu partai politik yang paling berperan adalah PKI karena lawan utama PKI yaitu Masyumi dan PSI telah dibubarkan oleh Sukarno. Upaya PKI melakukan ofensif gerakannya berkembang sangat pesat pasca pemilu 1955. Namun peran politik PKI dalam pemilu 1955 masih banyak ditolak banyak kalangan termasuk di pemerintahan disebabkan tindakan Pemberontakan tahun 1948 di Madiun. Dengan adanya Demokrasi Terpimpin, untuk pertama kalinya PKI masuk dalam pemerintahan (Kerstin Beise, 2004:14).

Setelah berlakunya Demokrasi Terpimpin di Indonesia, hubungan antara Presiden Sukarno dengan PKI semakin dekat dibandingkan dengan partai-partai yang lain, karena PKI sebagai partai pendukung utama kebijakan Sukarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Disamping itu antara Sukarno dan PKI terdapat persamaan persepsi dalam memandang berbagai masalah aktual

saat itu termasuk kecurigaannya pada militer dan pengaruh intervensi asing, khususnya Blok Barat terhadap masalah dalam negeri Indonesia.

Upaya PKI secara sistematis dimulai sejak Konggres Nasional tahun 1959 dengan menyusun rencana program yang disebut Plan Partai. Plan Partai ditetapkan dengan tujuan untuk menjadikan PKI sebagai partai kader dan massa. Dalam melaksanakan aksi-aksinya, PKI menggunakan Manipol sebagai landasan dengan menempatkan kaum buruh dan tani pada kedudukan yang istimewa, sebagai pelaku utama revolusi. Dalam rangka mendukung gerakannya, PKI berhasil mengorganisasi dan memobilisasi jutaan orang anggotanya. PKI menyusun program khusus dalam bidang sosial-ekonomi antara lain dengan berusaha mempertahankan tanah-tanah garapan, menurunkan sewa tanah, usaha menaikkan upah buruh dan tani. Program tersebut dalam rangka memperluas dukungan masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita politiknya.

Sejak tahun 1964 dan puncaknya tahun 1965 PKI semakin agresif dengan semangat untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak, seperti yang dianjurkan ketuanya DN Aidit. Propaganda PKI dalam meningkatkan sentimen anti lawan politiknya dilakukan melalui rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio serta poster-poster dipinggir jalan dengan menyebut golongan diluar PKI sebagai setan kota, setan desa, kapitalis birokrat yang harus disingkirkan.

Pada bulan Januari 1965 posisi PKI di Jakarta sangat kuat setelah Sukarno melarang partai Murba. Partai Murba sejak lama menentang PKI dalam rangka memperebutkan kepemimpinan golongan kiri (Ricklefs, 1991:423). Pada sekitar bulan Pebruari 1965, Ketua CC-PKI, DN Aidit mengusulkan dibentuknya organisasi Angkatan Kelima yaitu milisi rakyat yang dipersenjatai yang terdiri buruh dan tani, disamping kekuatan TNI dan Kepolisian. Alasan tuntutan PKI tersebut dalam rangka menambah kekuatan militer dalam menghadapi konflik dengan Malaysia melalui aksi Dwikora.

PKI juga mengusulkan agar prinsip-prinsip tentang Nasakomisasi disegala bidang diperluas, dengan cara membentuk tim penasehat yang mewakili unsur-unsur Nasakom untuk bekerja sama dengan para panglima dari keempat angkatan dalam TNI (Harold Crouch, 1999:92). Diantara keempat Panglima

Angkatan, hanya Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani yang secara tegas mendukung terbentuknya Angkatan Kelima .

Usul PKI untuk menasakomisasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata yang merupakan bagian dari kampanye PKI untuk mencapai tujuan adanya perwakilan Nasakom diseluruh lembaga negara dihalangi oleh para pemimpin Angkatan Darat (Harold Crouch, 1999:93). TNI-AD juga menentang dibentuknya Angkatan ke-5, dengan alasan bahwa Angkatan ke-5 dan pembentukan Komisaris-komisaris Politik, tidak diperlukan dalam lingkungan kemiliteran (Yahya Muhaimin, 2002:179).

Satu-satunya kekuatan organisasi atau kelembagaan yang dapat menandingi manuver PKI adalah TNI. Pengaruh partai politik dalam pemerintahan berkurang drastis sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin. Sebagai upaya untuk mensentralisasikan struktur organisasinya, TNI semakin solid dengan konsep Dwifungsinya yang mengintensifkan keterlibatan militer dalam administrasi sipil dan ekonomi Indonesia. Meski demikian terdapat friksi dalam militer yang disebabkan polarisasi antara perwira anti-komunis dan yang pro Sukarno atau perwira dari Jawa dan non Jawa(Kerstin Beise, 2004:13). Bahkan yang lebih berbahaya, ternyata PKI berhasil menyusup ke dalam tubuh Angkatan Darat, terutama Divisi Diponegoro, Jawa Tengah dan Divisi Brawijaya, Jawa Timur (Ricklefs, 1991:420).

Berpalingnya Sukarno dari negara-negara Barat, dengan meninggalkan prinsip-prinsip kebijakan gerakan non-blok yang mengarah pada terbentuknya poros Jakarta-Peking-Pyongyang-Hanoi, serta politik konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Sukarno dianggap telah dekat dengan ide-ide komunis dan PKI (Kerstin Beise, 2004:15). Amerika Serikat mengkhawatirkan bahwa Indonesia menjadi korban dari teori domino tentang penyebaran ideologi komunis. Sementara itu, pembangunan ekonomi Indonesia terhambat oleh konflik di pemerintahan sehingga situasi masyarakat menjadi tidak menentu.

Tindakan Sukarno yang melemahkan setiap kekuatan anti Komunis dengan dalih sebagai kontra revolusi,serta terbentuknya Poros Jakarta-Peking telah memberi kesempatan kepada PKI untuk menguasai hampir di sektor kehidupan bangsa dan negara kecuali bidang militer khususnya Angkatan Darat. Situasi politik semakin terpolarisasi setelah Sukarno mendukung terbentuknya Angkatan ke-5 yang merupakan ancaman bagi kekuatan militer.Setelah PKI

secara politis berhasil melemahkan lawan-lawan politiknya, ternyata kekuatan militer sebagai institusi sulit ditundukkan. Dalam rangka mendiskreditkan TNI-AD, PKI melancarkan adanya isue Dewan Jenderal. Dalam isue Dewan Jenderal disebutkan bahwa sejumlah perwira tinggi TNI-AD yang tidak loyal terhadap presiden yang mempunyai tujuan antara lain menilai kebijakan Presiden Sukarno selaku Pemimpin Besar Revolusi.

Bersamaan dengan isue tersebut, tersiar pula adanya "Dokumen Gilchrist". Gilchrist yang nama lengkapnya Sir Andrew Gilchrist adalah Duta Besar Inggris yang bertugas antara tahun 1963-1966. Dalam Dokumen Gilchrist berisi laporan Duta Besar Inggris, Gilchrist mengenai koordinasinya dengan Duta Besar USA di Jakarta untuk menangani situasi di Indonesia. Dokumen tersebut disebarluaskan oleh Subandrio yang saat itu menjabat Kepala Badan Pusat Intelejen (BPI) Menteri Luar Negeri.

Pada tanggal 26 Mei 1965, Subandrio membawa dokumen tersebut kepada Presiden Sukarno, sehingga para perwira militer TNI-AD seperti LetJen Ahmad Yani yang mempunyai hubungan dekat dengan Inggris dan USA diminta penjelasannya oleh Presiden terkait dengan isue dokumen tersebut. Pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1965 Presiden Sukarno menunjukkan kecurigaan dan permusuhannya terhadap kekuatan atau organisasi yang anti PKI terutama TNI-AD dan mengemukakan bahwa telah ditemukan adanya dokumen tentang rencana komplotan di dalam negeri yang bekerja sama dengan CIA dan pemerintah Inggris yang berusaha merobohkan pemerintahannya (Yahya Muhaimin, 2002: 183).

Secara teoritis, kegagalan pemerintahan sipil di suatu negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika dan Amerika secara tidak langsung memberi kesempatan pada pihak militer untuk mengambil-alih pemeritahan. Tersiar berita di luar negeri tentang beberapa kudeta militer di Irak pada Juli 1958, kemudian bulan Oktober 1958 pemerintahan sipil Pakistan jatuh ke tangan Jenderal Ayu Khan, di Burma ke tangan Ne Win, adanya kudeta di Thailand, rencana kudeta di Philipina serta pemerintahan Sipil Sudan juga ditumbangkan pihak militer.

Pers Jakarta juga memuat thesis dari Scott yang diantaranya berpendapat bahwa di negara-negara yang baru berkembang khususnya di Asia, perlu adanya kekuasaan diktator militer untuk menyelamatkan diri dari bahaya komunis (Daniel S. Lev, 1967:188-189). Kecenderungan adanya kudeta di negara-negara

lain tersebut, menjadikan Presiden Sukarno curiga terhadap militer yang akan merebut kekuasaannya.

Pada awal September 1965 terdapat isue bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan Presiden Sukarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka persiapan peringatan HUT TNI tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 30 September malam 1 Oktober 1965 ketegangan-ketegangan memuncak karena telah terjadi percobaan kudeta di Jakarta. Apa yang terjadi saat itu dan hari-hari berikutnya sedikit jelas namun tetap terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam mengenai siapa yang mendalangi percobaan kudeta. Tampaknya mustahil bahwa hanya ada satu dalang yang mengendalikan semua peristiwa itu. Tafsiran-tafsiran yang berusaha menjelaskan kejadian tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati (Ricklefs,1991:427). Meskipun demikian, walaupun gerakan itu secara resmi tidak menggunakan organ PKI dan secara resmi juga tidak melibatkan dalam peristiwa G-30/S 1965, namun PKI memainkan peranan besar dalam gerakan tersebut .

Perencanaan kudeta dimulai ketika diketahui kondisi kesehatan Sukarno memburuk sejak bulan Juli 1965. Kondisi kesehatan tersebut paling berpengaruh terhadap gejolak politik dalam negeri. (Kerstin Beise,2004:116). Presiden Sukarno sebagai posisi sentral dalam percaturan politik saat itu, sementara pertentangan antara PKI dengan TNI-AD hanya menunggu saatnya untuk menjadi perang terbuka,sangat beralasan jika kondisi kesehatan Sukarno menjadi faktor penting dalam peristiwa G-30/S 1965.

2) Pemberontakan G-30/S 1965

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 jenderal TNI-AD yaitu Letjen Ahmad Yani, Mayjen Haryono M. T,Brigjen D. I Panjaitan ditembak dirumahnya sementara Mayjen Suprpto, Mayjen S. Parman dan Brigjen Sutoyo ditembak di Lubang Buaya. Jenderal A.H Nasution lolos dari peristiwa penculikan tersebut, sehingga ajudannya Lettu P.A Tendean secara keliru dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Pada saat yang sama obyek-obyek vital di Jakarta seperti RRI (Radio Republik Indonesia) dan Telkom diduduki sementara Istana Merdeka dikepung.

Pelaksanaan kudeta adalah anggota-anggota militer dari Batalion 454 Diponegoro Jawa Tengah, Batalion 530 Brawijaya Jawa Timur serta Pasukan

Kehormatan Pengawal Presiden Pasukan Cakrabirawa yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok Pasopati yang dipimpin Dul Arief bertugas menculik para jenderal. Kelompok Bima Sakti yang dipimpin Suradi Prawiroharjo ditugaskan menguasai Jakarta. Kelompok Gatotkaca (juga dinamakan Pringgodani) yang dipimpin Gatut Sukrisno ditempatkan di Lubang Buaya. Pimpinan kudeta terdiri lima orang yang membentuk Senko (Sentral Komando) bermarkas di Halim Perdanakusuma. Kelima orang tersebut adalah Letkol Untung, Kolonel Latief, Sujono, Pono dan Syam. Apakah ada dalang dibelakangnya dan siapa, masih menjadi misteri (Kerstin Beise, 2004:17).

Setelah pasukan Bimasakti yang dipimpin Kapten Suradi menguasai RRI dan pusat jaringan informasi, pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 7.20 RRI menyiarkan tentang telah dilancarkan suatu gerakan yang bernama "Gerakan 30 September" dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalon I Resimen Cakrabirawa guna menyelamatkan Presiden Sukarno dan negara dari ancaman kudeta yang akan dilaksanakan oleh Dewan Jenderal yang disponsori Amerika Serikat. Juga disiarkan bahwa menurut Letkol Untung, Gerakan 30 September semata-mata gerakan dalam tubuh TNI-AD yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang anggota-anggotanya telah ditangkap, sedang Presiden Sukarno dalam keadaan selamat. Dalam siaran lanjutan di RRI juga disiarkan bahwa anggota Dewan Jenderal berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno pada saat berlangsungnya HUT TNI tanggal 5 Oktober 1965.

Selanjutnya, Brigjen Supardjo mengusulkan kepada Sukarno agar Mayjen Pranoto Reksosamudra diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat dan Sukarno menyetujuinya. Tindakan yang dilakukan Gerakan 30 September tersebut mendapat dukungan dari Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani (Yahya Muhaimin, 2002 :199).

Dengan terbunuhnya para jenderal TNI-AD serta tidak munculnya Jenderal Nasution karena bersembunyi telah memberikan kesempatan kepada Mayjen Suharto untuk memegang komando Angkatan Darat di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Sebagai perwira paling senior di Jakarta yang membawahi pasukan-pasukan secara langsung ,segera Suharto menjalankan wewenangnya (Harold Crouch, 1999:256).

Sementara itu, Panglima Kostrad Mayjen Suharto bertindak untuk memulihkan situasi di Ibukota dan pada malam hari tanggal 1 Oktober saat itu

juga, Suharto dapat menguasai Jakarta dan merebut gedung-gedung vital seperti RRI. Ia menjelaskan melalui siaran RRI tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya lapangan udara Halim yang dijadikan pusat Gerakan 30 September direbut pasukan RPKAD. Para pemimpin pasukan kudeta meninggalkan pangkalan Halim, D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah, sedangkan Omar Dhani menuju Madiun, sehingga gerakan kudeta berakhir dengan dikuasainya Ibukota Jakarta oleh TNI-AD yang anti PKI. Selanjutnya D.N Aidit tertangkap di Solo, Jawa Tengah. Sebelum ditembak mati ia menerangkan bahwa sebenarnya rencana pelaksanaan kudeta memang dipersiapkan oleh PKI pada tahun 1970. Rencana PKI tersebut akhirnya dilakukan terlalu tergesa-gesa sebab rencana tersebut telah diketahui oleh TNI-AD (John Hughes dalam Muhaimin, 2002: 201). Rencana kudeta PKI yang dipercepat dari rencana semula, dimungkinkan karena kekhawatiran pada kondisi kesehatan Sukarno. Jika Presiden meninggal, PKI khawatir jika TNI-AD terlebih dahulu mengambil-alih pemerintahan.

3) Lahirnya Orde Baru

Sikap Presiden Sukarno terhadap adanya peristiwa kudeta tersebut sering dinilai berbagai kalangan sebagai petunjuk atas pembelaannya terhadap Gerakan G-30/S 1965 (Kerstin Beise, 2004:379). Dan setelah peristiwa tersebut, Suharto dan TNI-AD memegang peranan kehidupan politik di Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Suharto menemui Presiden Sukarno di Bogor yang merupakan pertemuan pertama keduanya sejak terjadinya peristiwa kudeta. Pertemuan yang juga dihadiri pejabat Pemerintah dan Militer itu berlangsung dalam suasana yang tegang akibat perbedaan pandangan mengenai G-30/S.

Pada tanggal 4 Oktober 1965 di Lubang Buaya ditemukan mayat-mayat para jenderal dalam suatu lubang sumur. Tampaknya dalam penjelasan tentang peristiwa pembunuhan tersebut telah didramatisir. Hal ini menimbulkan emosi masa rakyat yang anti-Komunis yang kemudian diperhebat dengan kematian puteri A.H Nasution yang tertembak dalam peristiwa G-30/S yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Ketidakhadiran Presiden Sukarno dalam acara pemakaman para jenderal di Taman Pahlawan Kalibata menambah kemerosotan popularitas Sukarno dan menaikkan pamor TNI-AD.

Setelah ibukota Jakarta telah dikuasai TNI-AD dilanjutkan meredamkan konflik serupa yang terjadi terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut mempunyai basis masa PKI yang besar disamping kesatuan

militer Diponegoro dan Brawijaya terindikasikan telah jatuh pada pengaruh Gerakan 30 September. Dengan perkembangan terjadinya peristiwa tersebut, TNI-AD telah dipandang sebagai “Penyelamat Bangsa” oleh kekuatan anti-PKI sehingga posisi TNI semakin kuat bahkan menjadi pusat perhatian nasional ketika pada tanggal 16 Oktober 1965 Mayor Jenderal Suharto diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, sementara Jenderal A.H Nasution tetap pada posisi Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Tuntutan dibubarkannya PKI di masyarakat berkembang begitu cepat, pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa yang anti-PKI. Dalam demonstrasi yang ditujukan pada pemerintah mereka menuntut tiga hal yang dikenal sebagai Tritura (Tri Tuntunan Rakyat) yaitu: Pembubaran PKI, Pembentukan Kabinet Baru, Penurunan Harga

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengambil kebijakan yang tidak populer dengan melakukan reshuffle kabinet. Namun yang diganti adalah Menteri Koordinator Pertahanan-Kelompokan Jenderal A.H Nasution diganti oleh Mayor Jenderal Sarbini dan Presiden juga mengangkat menteri baru yang dianggap masyarakat sebagai pro-PKI. Hal ini yang memicu demonstrasi lebih besar di masyarakat yang juga didukung TNI-AD.

Adanya perkembangan politik tanpa kepastian, mamaksa TNI-AD melakukan tekanan-tekanan kepada presiden. Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Suharto pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret. Supersemar telah memberi TNI-AD berupa legitimasi politik untuk berperan formal dalam mengatasi situasi pascaG-30/S. Setelah adanya Supersemar yaitu tanggal 12 Maret, Suharto membubarkan PKI beserta seluruh organisasi berada di bawahnya dari Pusat sampai Daerah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia. Akhirnya posisi Suharto semakin kuat ketika MPRS yang anggotanya telah dibersihkan dari orang-orang PKI dalam Sidang Umumnya berhasil membuat keputusan-keputusan yang berisi penguatan legitimasi peranan politik Angkatan Darat serta mengurangi kekuasaan Sukarno.

Diantara ketetapan MPRS tersebut adalah Ketetapan No. IX tentang pengukuhan “Surat Perintah Sebelah Maret” yang mengesahkan kekuasaan politik Suharto sebagaimana terkandung dalam Surat Perintah tersebut hingga terbentuknya MPR hasil pemilihan umum dan Ketetapan No. XIII, yang memberi kekuasaan kepada Letjen Suharto untuk membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet Dwikora dengan tugas pokok membina perekonomian dan pembangunan. Kemudian Ketetapan No.XV yang memberi kuasa kepada Suharto untuk memegang jabatan presiden jika sewaktu-waktu presiden berhalangan, sedangkan Ketetapan No. XXV berisi pengesahan pembubaran PKI, yang telah dilaksanakan Suharto tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 25 Juli 1966 Jenderal Suharto membentuk kabinet baru sesuai keputusan MPRS dengan nama Kabinet Ampera.

Tertumpasnya pemberontakan G 30/S oleh TNI merupakan batas toleransi terakhir yang diberikan tentara terhadap cara berpikir partai politik, yang dianggapnya selalu memunculkan konflik. Keinginan membentuk negara yang demokratis sebagaimana kehidupan politik di negara-negara Barat, dianggap oleh TNI belum serasi untuk diterapkan di negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya munculnya kepemimpinan dari golongan tentara (Tudiruan Dydo, 1989:92-93).

Akhirnya Sukarno tidak bertindak untuk melawan kekuatan-kekuatan baru tersebut. Tindakan Suharto yang berhasil menguasai situasi menyebabkan Sukarno terpaksa turun dari kekuasaannya dan Suharto membentuk pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru.

4) Perkembangan Perekonomian pada Masa Orba

Rehabilitasi perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru berkaitan dengan upayanya memisahkan diri dari negara-negara komunis dan menjalin hubungan dengan dunia nonkomunis termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Langkah-langkah penting lainnya dengan diakhirinya konfrontasi dengan Malaysia yang ditindaklanjuti dengan didirikannya ASEAN pada tahun 1967. Kemudian Indonesia juga masuk kembali sebagai anggota PBB pada tahun 1966.

Pada awal tahun 1967 negara-negara non-komunis membentuk sebuah konsorsium yang dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Dalam rangka menyiapkan prakondisi menuju pembangunan

ekonomi, pemerintah membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi (Priyo Budi Santoso, 1995:120).

Hasil yang dicapai dalam rentang waktu pendek cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dimulailah penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I pada tahun 1969 sebagai titik awal dari serangkaian rencana pembangunan yang akan dilakukan dalam tahap-tahap berikutnya. Repelita I merupakan suatu perencanaan pembangunan parsial dengan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor yang dianggap krisis dalam perekonomian Indonesia. Repelita I telah mengubah citra perencanaan dan pembangunan Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh hasil-hasil pelaksanaan Repelita berikutnya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi meningkat cukup signifikan.

5) Tumbangnya Orde Baru

Pemberontakan G-30/S yang gagal telah membawa perubahan tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Peranan golongan tentara yang berhasil menumpas G-30/S menaikkan citranya di mata masyarakat. Munculnya Jenderal Suharto sebagai kepala negara baru, memperluas peran TNI dalam aspek sosial-politik. Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru selanjutnya, keadaan bercorak militer di hampir semua sektor kegiatan kekuasaan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya juga menimbulkan kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa yang ketika lahirnya pemerintahan Orde Baru, mereka berperan sangat besar (Todiruan Dydo, 1989:105).

Setelah berkuasa hampir 32 tahun akhirnya Presiden Suharto juga ditumbangkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran bahkan menuju pada tindakan anarkhis. Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa tersebut terjadi ketika pada akhir tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berlarut-larut. Pemerintah Suharto dianggap menyuburkan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Puncaknya pada tahun 1998 Suharto terpaksa mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J Habibie sehingga Orba akhirnya berakhir.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan.. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.
2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas. Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 4 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya .setiap kelompok mengerjakan semua tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK I

Tugas Individu

- 1). Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia, kabinet sering jatuh Bangun?
- 2). Jelaskan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

- 3). Apa yang dimaksud dengan peristiwa Tanjung Morawa?
- 4). Apa yang Anda ketahui tentang “Supersemar”?
- 5). Jelaskan latar belakang jatuhnya pemerintahan Orde Baru?

Beri penjelasan hal berikut

No	Fakta dan Peristiwa	Latar belakang	Keterangan
1	Peristiwa Tanjung Morawa	
2	Indonesia keluar sebagai anggota PBB	
3	Penyimpangan politik dalam negeri masa Demokrasi Terpimpin	

LK2

Tugas Kelompok

Diskusikan topik-topik berikut ini:

- 1) Identifikasikan penyimpangan-penyimpangan dalam aturan ketatanegaraan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin
- 2) Bagaimana anda sebagai seorang guru sejarah menjelaskan materi yang kontroversi kepada siswa namun tetap menjaga nilai-nilai nasionalisme dan persatuan bangsa ? (Contoh: Materi tentang Pemberontakan G-30/S).
- 3) Buatlah bagan tentang masalah-masalah yang menonjol pada masa:
 - Demokrasi Liberal,
 - Demokrasi Terpimpin,
 - Orde Baru

F. RANGKUMAN

Perjalanan sejarah bangsa antara tahun 1950-1966 diliputi suasana pertentangan internal antara elemen-elemen bangsa.. Pada masa tahun 1950-

1966 dikelompokkan dalam tiga masa pemerintahan yaitu masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Pada masa Demokrasi Liberal terjadi perbedaan kepentingan yang menonjol di antara partai-partai politik yang ada. Sistem parlementer yang dicoba di Indonesia mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan hanya dalam kurun waktu sembilan tahun tercatat kurang lebih terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketika Pemilu I di Indonesia tahun 1955, rakyat mengharapkan bahwa hasil pemilu tersebut dapat menjadikan perjalanan pemerintahan yang lebih baik. Namun Dewan Konstituante yang merupakan badan perancang dan pembuat undang-undang dasar hasil pemilu I tersebut juga gagal melaksanakan tugasnya. Partai-partai politik dalam Dewan Konstituante saling mempertahankan ideologinya sehingga mengalami jalan buntu dalam mengambil keputusan.

Dalam suasana stagnan tersebut, Presiden mengambil keputusan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya presiden menerapkan Demokrasi Terpimpin. Namun pada masa ini, Indonesia terseret pada arus totaliter atau diktator. Presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Disamping itu, PKI menjadi kekuatan yang besar pasca pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada Pemilu I PKI termasuk dalam kategori partai besar dalam jumlah suara.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingan diantara ketiga kekuatan tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan keruntuhan Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan sebagai kekuatan yang berada dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia ditinjau ulang.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?
3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
BERDASARKAN PERMENDIKBUD
NO. 104 Tahun 2014

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat mampu memahami penilaian autentik sesuai dengan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan mengaplikasikan pada pembelajaran sejarah.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Mengemukakan pengertian penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Menjelaskan fungsi penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Menjelaskan tujuan penilaian Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Menjelaskan prinsip penilaian Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Menjelaskan lingkup penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Mengidentifikasi acuan penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

7. Memprediksi ketuntasan belajar berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

C. URAIAN MATERI

1. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar, salah satunya adalah Standar Penilaian. Standar penilaian bertujuan untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan, meliputi: a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan c) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effects*) dan dampak pengiring (*nurturant effects*) dari pembelajaran.

Penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (*scientific approach*), karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik

dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring.

Jenis penilaian autentik antara lain penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian proyek, termasuk penilaian diri peserta didik. Penilaian autentik adakalanya disebut penilaian responsif, suatu metode untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, sampai yang jenius. Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu di dukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar.

Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain itu bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (*transfer of learning*). Sedangkan bagi guru, hasil penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

2. Pengertian Penilaian Hasil Belajar menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
- b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penguasaan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

- g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- j. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
- k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

3. Fungsi Penilaian menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014

- a. Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau.
- b. Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan.

4. Tujuan Penilaian :

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tujuan penilaian meliputi :

- a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai

seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.

- b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
- d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

5. Acuan Penilaian

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 acuan penilaian meliputi :

- a. Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.
- b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.
- c. Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan.

6. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014, meliputi :

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- i. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

7. Lingkup Penilaian

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014, lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

a. Sikap (Spiritual dan Sosial)

Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut :

Tingkatan Sikap	Deskripsi
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menanggapi nilai	Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya
Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

(sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964)

b. Pengetahuan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah sebagai berikut.

Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian

Kemampuan Berpikir	Deskripsi
Mengingat: Mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber lainnya sebagaimana aslinya, tanpa melakukan perubahan	Pengetahuan hafalan: Ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat dan digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur, hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa diubah/berubah.
Memahami: Sudah ada proses	Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang baru seperti menggantikan

<p>pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah</p>	<p>suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang sama maknanya; menulis kembali suatu kalimat/paragraf/tulisan dengan kalimat/paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau sebaliknya; memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/tulisan/data sesuai dengan kemampuan peserta didik; memperkirakan kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/paragraf/tulisan/data.</p>
<p>Menerapkan: Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari</p>	<p>Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya, suara, listrik, hukum penawaran dan permintaan, hukum Boyle, hukum Archimedes, membagi/mengali/menambah/mengurangi/menjumlah, menghitung modal dan harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.</p>
<p>Menganalisis: Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara</p>	<p>Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciricirinya, memberi nama bagi kelompok tersebut, menentukan apakah satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan muncul, menentukan mana yang memberikan pengaruh dan mana yang menerima pengaruh, menemukan keterkaitan antara fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi</p>

<p>satu kelompok/ informasi dengan kelompok/ informasi lainnya, antara faktadengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya</p>	<p>antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya, menemukan pikiran pokok penulis/pembicara/nara sumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya, dan sebagainya</p>
<p>Mengevaluasi: Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria</p>	<p>Kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi/benda menarik/menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan/keputusan/peraturan, memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar/salah/bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria</p>
<p>Mencipta: Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya</p>	<p>Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya.</p>

(sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001).

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran
Konseptual	Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori
Prosedural	Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur
Metakognitif	Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (strategic knowledge), pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (self-knowledge)

(Sumber: Olahan dari Anderson, dkk., 2001)

c. Penilaian Keterampilan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut:

Kemampuan Belajar	Deskripsi
Mengamati	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati
Menanya	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan informasi/mencoba	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang

	dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/mengasosiasi	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber
Mengomunikasikan	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain

(Sumber: Olahan Dyers)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan konkret adalah sebagai berikut

Keterampilan Konkret	Deskripsi
Persepsi (<i>perception</i>)	Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan
Kesiapan (<i>set</i>)	Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan
Meniru (<i>guided response</i>)	Meniru gerakan secara terbimbing
Membiasakan gerakan (<i>mechanism</i>)	Melakukan gerakan mekanistik
Mahir (<i>complex or overt response</i>)	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi

Menjadi gerakan alami (<i>adaptation</i>)	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya
Menjadi tindakan orisinal (<i>origination</i>)	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

Sasaran penilaian digunakan sesuai dengan karakteristik muatan pelajaran.

8. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan. Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat)
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B). Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00

untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
3,85 – 4,00	A
3,51 – 3,84	A-
3,18 – 3,50	B+
2,85 – 3,17	B
2,51 – 2,84	B-
2,18 – 2,50	C+
1,85 – 2,17	C
1,51 – 1,84	C-
1,18 – 1,50	D+
1,00 – 1,17	D

Permendikbud nomor 104 pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan ditetapkan paling kecil 2,67.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi, humanistik dan konstruktivis. Lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengetahuan dan pengalaman peserta diklat untuk digunakan sebagai titik tolak menganalisis materi dalam modul, mengkonstruksi pemahaman dan penerapannya. Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi diklat ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan.. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang

relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.

2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas. Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 4 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya .setiap kelompok mengerjakan satu tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK 1

Tugas Individu

1. Makna penilaian otentik adalah:
 1. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu
 2. Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap),
 3. Memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus
 4. Prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompokPernyataan di atas yang benar adalah:
 - A. 1,2
 - B. 1,3
 - C. 2,3
 - D. 3,4
2. Teknik penilaian nontes adalah
 - A. teknik pengamatan/observasi, penugasan
 - B. teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung
 - C. penilaian menggunakan skala sikap dan atau angket

- D. teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian
3. Penilaian sikap (spritual dan sosial) dapat diwujudkan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, jika guru membelajarkan sejarah secara inspiratif dan edukatif kepada peserta didik sehingga menjadi wahana ...
 - A. membangun memori kolektif
 - B. penerusan pengetahuan masa lampau
 - C. memahami konsep ruang dan waktu
 - D. sosialisasi dan enkulturasi
 4. Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia diantaranya dilakukan dalam bentuk tes dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk
 - A. penilaian proyek dan portofolio
 - B. penugasan, observasi, dan portofolio
 - C. penilaian diri dan penilaian antar peserta didik
 - D. ulang
 5. Di bawah ini dikemukakan tentang penilaian proses dan hasilbelajar.
 1. Penilaian dalam kegiatan diskusi
 2. Ulangan harian
 3. Ujian tengah semester
 4. Tugas mandiri terstruktur
 5. Penilaian dalam kegiatan presentasi
 6. Jenis penilaian di atas yang termasuk penilaian proses adalah
 - A. 1 dan 2
 - B. 3 dan 4
 - C. 1 dan 5
 - D. 2 dan 4

LK 2

Diskusi Kelompok

Diskusikan topik-topik berikut ini:

- a. Alasan Kurikulum 2013 menggunakan penilaian Autentik
- b. Implementasi prinsip-prinsip penilaian autentik dalam pembelajaran Sejarah
- c. Implementasi lingkup penilaian autentik dalam pembelajaran Sejarah Indonesia
- d. Prediksi keberhasilan penggunaan penilaian autentik terhadap ketuntasan belajar dalam pembelajaran sejarah

F. RANGKUMAN

1. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian berfungsi untuk menentukan kemajuan belajar dan mengembangkan perilaku siswa, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan tentang metode yang digunakannya sudah tepat. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan. Penilaian Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio
2. Fungsi Penilaian: fungsi penilaian untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi: penilaian formatif dan penilaian sumatif.
3. Ketuntasan Belajar: Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penilaian hasil belajar oleh pendidik?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penilaian hasil belajar oleh pendidik?
3. Apa manfaat materi penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu memahami konsep sumber dan media pembelajaran dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan konsep sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mata pelajaran Sejarah.
2. Menjelaskan konsep media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mata pelajaran Sejarah
3. Membedakan jenis sumber dan media pembelajaran sejarah berdasarkan karakteristiknya.
4. Menjelaskan kriteria kualitas sumber dan media pembelajaran sejarah.
5. Mengetahui kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran sejarah
6. Menjelaskan prinsip pemanfaatan sumber media pembelajaran sejarah

C. URAIAN MATERI

1. Sumber Dan Media Pembelajaran

Keberhasilan dalam mengajar merupakan dambaan setiap guru. Indikasi keberhasilan guru adalah bila seluruh siswa mampu menangkap makna tentang pengetahuan yang disampaikan oleh guru sehingga siswa tersebut mampu menumbuhkembangkan potensi yang dimilikinya yang pada akhirnya siswa dapat memperoleh manfaat secara langsung dalam kehidupannya.

Disadari bahwa untuk menuju suatu keberhasilan pembelajaran bukan merupakan hal mudah, sebab banyak komponen yang harus dipadukan antara lain guru, siswa, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, alat evaluasi dan lain sebagainya. Komponen yang sangat menentukan adalah guru. Mengapa demikian? Sebab gurulah yang diberi kewenangan untuk mengatur

dan memadukan semua komponen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Implikasi dari penerapan praktek belajar ini adalah digunakannya berbagai sumber dan media pembelajaran yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar seperti slide, film, radio, televisi dan komputer yang dilengkapi dengan CD ROM dan hubungan dengan internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu lokal, nasional dan global.

2. Sumber Pembelajaran

(1) Sumber Belajar

a) Pengertian Sumber Belajar

Komponen sumber belajar tidak bisa dilepaskan dari proses belajar mengajar, apabila menginginkan suatu keberhasilan pengajaran, hal ini karena sumber belajar merupakan masukan dalam proses pengajaran itu sendiri.

Masalah sumber belajar memang masih belum banyak menarik perhatian, sehingga sebagian besar dalam proses pengajarannya komponen guru masih merupakan sumber belajar yang paling utama. Di lain pihak pendidik masih enggan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya untuk disajikan dalam proses pengajarannya. Keengganan ini disebabkan karena masih kurangnya atau minimnya pengetahuan guru tentang sumber belajar sehingga peserta didik hanya mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu lewat pendidik saja, akibatnya peserta didik tidak tertarik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang lain selain dari pendidik.

Sujana dan Rivai dalam bukunya Teknologi Pengajaran menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya, sedang secara luas itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian, atau keseluruhan.

Husnan, dkk. dalam makalahnya yang berjudul Sumber Belajar dan Alat Peraga menuliskan: sumber belajar merupakan sumber bahan yang berupa data, benda-benda atau informasi yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran.

Menurutnya sumber belajar tidak terbatas pada benda-benda fisik seperti radio, surat kabar, sawah, sungai dan sebagainya tetapi dapat berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan sumber belajar dapat pula berupa media pengajaran.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas ternyata pengertian sumber belajar dapat diartikan secara sempit dan secara luas.

- 1) Dalam arti sempit, sumber belajar hanya terkait dengan buku dan bahan-bahan cetak untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendidik.
- 2) Dalam arti luas, sumber belajar adalah segala apa yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar guna memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Fungsi Sumber Belajar

Dengan melihat potensi yang dimiliki sumber belajar yang demikian besar untuk pencapaian tujuan pendidikan maka sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan kegairahan belajar. Bukan guru saja yang dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar, melainkan lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) juga dapat dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah.
- 2) Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik untuk disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya.
- 3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman-pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik yang tetap akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama.
- 4) Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- 5) Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda itu akibat sumber yang digunakan belum bisa menggambarkan atau menjelaskan hakekat/pengertian dari sesuatu yang diajarkan.

b) Macam-macam Sumber Belajar

- 1) Sumber belajar yang direncanakan. Sumber yang direncanakan yaitu sumber belajar yang memang dengan sengaja direncanakan dan dipersiapkan untuk menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, contoh: laboratorium.
- 2) Sumber belajar yang tidak direncanakan. Sumber belajar yang tidak direncanakan yaitu sumber belajar yang pada dasarnya tidak direncanakan dalam kegiatan pendidikan namun karena keadaan dan kondisinya dimungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan maka keadaan atau situasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh rumah sakit pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan suatu masyarakat, tetapi rumah sakit tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar apabila seseorang sedang membicarakan pokok bahasan tentang kesehatan.

Penggolongan sumber belajar menjadi 2 bagian tersebut tidaklah mutlak, hal ini masing-masing ahli dapat membagi berdasarkan pengetahuannya masing-masing:

Menurut AECT (Association of Education Communication Technology) melalui karyanya "The Definition of Educational Technology (1977) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam:

- 1) Pesan (*Message*) ialah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian dan data.
- 2) Manusia (*people*) ialah orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa manusia adalah sumber dari segala sumber belajar.
- 3) Bahan (*materials*) ialah perangkat lunak yang mengandung pesan disajikan kepada peserta didik dengan menggunakan perantara melalui alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri.
- 4) Peralatan (*device*) ialah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan (*materials*).
- 5) Teknik/metode (*technique*) yaitu prosedur atau alur yang dipersiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi dan orang untuk menyampaikan pesan. Contoh sumber belajar yang dirancang adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan sebagainya.

6) Lingkungan (*setting*) yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, atau non fisik. Suasana belajar contoh sumber belajar yang direncanakan untuk jenis ini adalah ruangan kelas, perpustakaan, auditorium. Sedang sumber belajar yang tidak direncanakan adalah taman rekreasi, kebun, museum, toko, balai kesehatan masyarakat dan sebagainya.

c) Petunjuk Penggunaan Sumber Belajar

Menggunakan sumber belajar dalam pembelajaran memerlukan persiapan dan perencanaan yang seksama dari pendidik. Tanpa perencanaan yang matang kegiatan belajar siswa tidak bisa terkendali, sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai.

Perencanaan itu mencakup semua sumber belajar baik yang berkaitan dengan manusia maupun non manusia, baik sumber belajar yang dierncanakan atau yang hanya dimanfaatkan. Maksud dari perencanaan ini agar setiap komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa, sehingga seluruh komponen saling berinteraksi dan berantaraksi secara sistematis sehingga keberadaan sumber belajar tersebut betul-betul dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui pendidik dalam merencanakan sumber belajar, antara lain:

- 1) Tujuan pembelajaran hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber belajar yang tepat.
- 2) Mengkaji materi yang akan diajarkan. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan.
- 3) Tentukan obyek yang harus dipelajari dan dikunjungi (bila sumber belajar yang berkaitan dengan lingkungan). Dalam menentukan obyek kunjungan hendaknya diperhatikan relevansi dengan tujuan belajar, kemudahan menjangkaunya, mudah tidaknya perjalanan, lama waktu yang diperlukan, keamanan peserta didik.
- 4) Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan.

- 5) Menentukan kegiatan pendidik dan peserta didik. Misalnya untuk pendidik pemilihan strategi, metode pengajaran disesuaikan dengan sumber belajar, mempersiapkan perijinan, penentuan kelompok, dan lain sebagainya, sedang untuk peserta didik, mengamati suatu proses, mencatat apa yang terjadi, wawancara dengan nara sumber dan lain sebagainya.
- 6) Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti tata tertib di perjalanan dan di tempat tujuan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan yang akan diajukan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan yang akan diajukan, perlengkapan kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Pengertian Media Pembelajaran

Para ahli memberi batasan media pembelajaran berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi, dari berbagai batasan yang diberikan oleh para ahli itu ada persamaan pengertian, bahwa media sebagai penyalur pesan. Agar didapat gambaran yang jelas tentang media pembelajaran, berikut ini pendapat beberapa ahli:

- 1) S. Gerlach dan P. Ely dalam bukunya *Teaching and Media* (1971) memberi batasan media secara luas dan sempit. Dalam arti yang luas, media meliputi orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan siswa belajar. Bila pengertian ini yang diikuti maka guru dan lingkungan sekolah termasuk media. Dalam pengertian yang sempit, media meliputi grafik, gambar, alat-alat elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi.
- 2) Robert M. Gagne dalam bukunya *The Condition of Teaching* (1970) menggunakan istilah media pembelajaran untuk menunjukkan berbagai komponen lingkungan belajar yang dapat merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Termasuk dalam pengertian ini guru, objek, berbagai macam alat mulai dari buku sampai televisi.
- 3) *Association of Educational Communication and Technology* (AECT), yaitu suatu ikatan para ahli teknologi komunikasi pendidikan di Amerika memberikan batasan media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan.

- 4) Wilkinson (1980), mengartikan media sebagai segala alat dan bahan selain buku teks yang dapat dipergunakan untuk informasi penyampaian informasi dalam suatu situasi belajar mengajar.
- 5) Hamidjoyo dan Dirgosemarto (1981), media adalah segala bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebarkan ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima.
- 6) Luhan dan Dirgosoemarto (1981), media adalah sarana yang disebut *channel* karena pada hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu.
- 7) Blake dan Horalsen (dalam Dirgosoemarto, 1981) media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu pesan, di mana medium ini merupakan jalan atau alat dengan nama suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan.

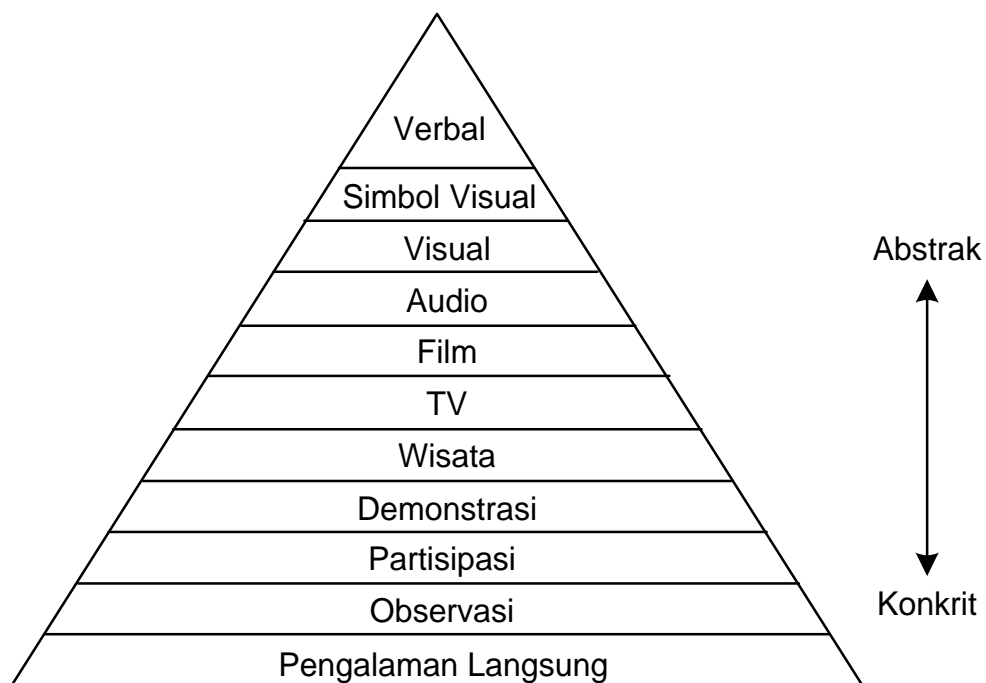
Dengan batasan-batasan itu, Arief S. Sadiman merumuskan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.

Dewasa ini, kadang membingungkan antara media dan alat praga, karena pada alat atau benda yang sama kadang orang menyebutnya sebagai media dan bagi orang yang lain menyebutnya sebagai alat praga. Untuk mengetahui perbedaan antara media dan alat praga/alat bantu hanyalah pada fungsinya, bukan pada substansi. Suatu sumber belajar dikatakan alat praga jika hal tersebut digunakan untuk mempragakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/konkret, misalnya dengan mengajar tumbuhan dengan membawa gambar tumbuhan atau benda aslinya tersebut ke kelas. Sebagai alat bantu jika alat/benda itu digunakan untuk mempermudah tugas mengajar, fungsinya hanya sebagai alat bantu saja, tidak terkandung pesan/isi/bahan pelajaran. Dalam pelajaran tentang kuman misalnya, bantuan mikroskop sebagai alat pengajaran sangat penting. Demikian pula dalam pelajaran menggambar, mistar atau kuas berfungsi sebagai alat pengajaran yang sering diperlukan. Lain halnya dengan media, yaitu, selalu mengandung pesan atau isi pelajaran didalamnya, merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar dan

ada pembagian tanggung jawab antara guru kelas atau dosen di satu pihak dan sumber lain di lain pihak.

Kalau dilihat perkembangannya, pada mulanya media memang hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (*teaching aids*). Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi siswa. Kelamahan praktik penggunaan alat bantu visual pada saat itu ialah bahwa orang terlalu memusatkan perhatian pada alat visualnya saja dan kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan instruksional, produksi dan evaluasinya.

Untuk lebih mengkonkretkan penyajian pesan, sekitar pertengahan abad 20 mulai digunakan alat audio sehingga lahirlah istilah alat bantu audiovisual. Usaha tersebut terus berlanjut dengan munculnya pendapat Edgar Dale dalam mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi itu dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale.



Gambar 2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala wujud yang dapat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar/mengajar ke tingkat yang lebih efektif dan efisien.

4. Kegunaan/Fungsi Media

Dalam proses belajar mengajar seringkali apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa mengalami penyimpangan-penyimpangan bahan ajar yang diberikan guru tidak dapat diterima oleh siswa secara baik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap siswa.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu digunakan media dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di samping berfungsi sebagai penyaji stimulus (informasi sikap, dan lain-lain) media juga berfungsi meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi.

Beberapa fungsi media dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media dapat menyamakan pengamatan. Pengamatan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Media dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media dalam proses belajar mengajar, maka materi yang disampaikan akan lebih benar, kongkrit dan realistik. Dengan demikian akan mempermudah siswa memahami materi.
3. Media dapat mengatasi keterbatasan dalam hal ruang. Contoh benda-benda yang telah berada di ruang-ruang tertentu tidak mungkin dapat dipindahkan ke dalam kelas. Borobudur yang berada di Magelang, Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur.
4. Media dapat mengatasi keterbatasan ukuran. Contohnya obyek yang disampaikan oleh guru terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan menggunakan media kesulitan bisa diatasi, obyek yang terlalu kecil dapat digunakan gambar atau alat pembesar (mikroskop). Demikian pula obyek yang besar dapat menggunakan gambar.

5. Media dapat mengatasi keterbatasan waktu berarti peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak mungkin diulang lagi. Untuk mempelajari peristiwa lampau dapat melalui foto atau rekaman video.
6. Media pembelajaran memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan walaupun media pembelajaran yang digunakan berupa gambar, namun siswa akan dapat berinteraksi.
7. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif peserta didik. Peserta didik akan lebih bergairah dalam belajar.

5. Keistimewaan Media

Gerlach dan Ely dalam bukunya "*Teaching and Media: A Systematic Approach*" mengemukakan ada tiga keistimewaan media, yaitu keistimewaan fiksatif, keistimewaan manipulatif, dan keistimewaan distributif. Ketiga keistimewaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keistimewaan Fiksatif

Keistimewaan fiksatif berkenaan dengan kemampuan media untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini memungkinkan suatu obyek dapat dipotret, digambar atau direkam, kemudian disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditampilkan serta diamati kembali. Keadaan obyek yang ditampilkan sesuai dengan obyek nyatannya.

2. Keistimewaan Manipulatif

Keistimewaan ini berkaitan dengan kemampuan media untuk menampilkan kembali suatu obyek, peristiwa atau kejadian dengan berbagai macam cara sesuai keperluan. Maksud obyek atau kejadian itu ditampilkan dengan perubahan ukuran, kecepatan, serta dapat diulang-ulang penampilannya. Obyek yang disajikan diubah sesuai dengan keperluannya.

3. Keistimewaan Distributif

Keistimewaan distributive yaitu dalam sekali penampilan suatu obyek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar jumlahnya dan tersebar dalam kawasan yang sangat luas. Misalnya penggunaan televisi, surat kabar, atau radio. Keistimewaan ini

berkenaan dengan kemampuan media dalam menyebarkan informasi yang dikandungnya kepada sejumlah penerima lebih banyak.

6. Kriteria Pemilihan Media

Kriteria pemilihan media antara lain:

- 1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
- 2) Dukungan terhadap isi bahan pengajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.
- 3) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.
- 4) Keterampilan guru menggunakannya, artinya secanggih apapun sebuah media apabila tidak tahu cara menggunakannya maka media tersebut tidak memiliki arti apa-apa.
- 5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.
- 6) Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para peserta didik. Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- 7) Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.
- 8) Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media, antara lain biaya, ketersediaan fasilitas pendukung, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan

tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, dan kegunaan.

7. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu:

- 1) Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film televisi.
- 2) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, dsb.
- 3) Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara.
- 4) Media visual bergerak, seperti: film bisu.
- 5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, *microphone*, *slide* bisu.
- 6) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio.
- 7) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

8. Prinsip Pemilihan Media

Setiap tindakan memerlukan cara penanganan yang berbeda. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di kelas memerlukan kiat dan strategi yang berbeda-beda pula, termasuk dalam menggunakan media pembelajaran. Sebelum kita melakukan pemilihan media, ada beberapa asumsi dasar yang perlu kita ingat, yaitu:

- 1) Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan, karena itu kita perlu memilih media yang sesuai dengan karakteristik media tersebut.
- 2) Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. Namun harap diingat, bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran, justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, pilihlah media yang memang sangat diperlukan dan jangan berlebihan.
- 3) Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik memilih media yang sederhana yang dapat mengaktifkan

seluruh siswa daripada media canggih namun justru membuat siswa kita terheran-heran pasif.

- 4) Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya.
- 5) Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, “daripada tidak dipakai”, akan membawa akibat negatif yang lebih buruk daripada tidak memakainya sama sekali.
- 6) Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami konsep sumber dan media pembelajaran, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan kelompok, menggunakan pendekatan andragogi, humanistik dan konstruktivis. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi tugas membaca dengan cermat materi dalam modul ini, sehingga dapat dipahami substansi yang disajikan.. Selama membaca, anda dapat menganalisis materi diklat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, atau menggunakan referensi lain yang relevan. Selanjutnya kerjakanlah latihan/tugas pada LK1 yang disediakan pada sub Latihan/Kasus/Tugas.
2. Aktivitas kelompok meliputi kegiatan mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LK2 di sub Latihan/Kasus/Tugas. Untuk kepentingan kerja kelompok, anda bersama teman-teman peserta diklat perlu membentuk 6 kelompok, dengan memilih model pengelompokan yang dianggap efektif. Setiap kelompok menetapkan ketua, sekretaris atau peran-peran yang dituntut oleh model kelompok yang dipilih. Selanjutnya .setiap kelompok mengerjakan tugas pada LK2. Anda dalam kelompok dapat bertukar pengalaman mengenai proses dan hasil diskusi yang sudah dicapai. Rumuskan kesimpulan dan laksanakan refleksi pada akhir kegiatan setiap kelompok

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

LK 1

Tugas Individu

Setelah mempelajari materi modul di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- 1) Deskripsikan bahwa media merupakan bagian tak terpisahkan dari kualitas pembelajaran!

Jawaban:

.....

- 2) Kemukakan dengan kata-kata sendiri perbedaan karakteristik jenis media dan sumber belajar, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media dalam pembelajaran sejarah!

Jawaban:

.....
.....
.....

- 3) Deskripsikan dengan singkat bahwa media dapat menghasilkan keseragaman dan pengalaman yang integral berdasarkan karakteristik peserta didik

Jawaban:

.....
.....
.....

- 4) Tidak semua media dapat menjamin keberhasilan pembelajaran jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik. Bagaimanakah kriteria pemilihan dan pemanfaatan media yang dipilih agar dapat digunakan dengan baik dalam pembelajaran sejarah?

Jawaban:

.....
.....
.....

- 5) Kemukakan pengertian dan fungsi sumber belajar dalam pembelajaran sejarah!

Jawaban:

.....
.....
.....

LK2

Tugas Kelompok

Kerjakan tugas berikut ini:

Pilih dan tentukan sumber belajar, jenis media, dan alat pembelajaran yang sesuai, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kerjakan LK dibawah ini dengan menggunakan format yang telah disediakan.

FORMAT TUGAS PELATIHAN SUMBER DAN MEDIA

Nama Sekolah :
 Mata Pelajaran :
 Kelas/Semester :
 Alokasi Waktu :

Kompetensi Inti		
Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok

A. TUJUAN PEMBELAJARAN:

.....

B. PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN

Spesifikasi Materi	Materi	Jenis Media

C. SUMBER BELAJAR

.....

.....
Catatan: tuliskan di bawah ini alasan-alasan memilih dan menetapkan setiap jenis media dalam kolom ketiga di atas
.....
.....
.....

F. RANGKUMAN

Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Sumber belajar yang dimaksud meliputi pesan (*message*), orang (*people*), bahan (*material/software*), alat (*devices/hardware*), teknik (*technique*) dan lingkungan (*setting*).

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dari sumber belajar yang dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Media merupakan perpaduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa kita pahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam konteks pembelajaran dan digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses komunikasi tersebut, terlihat bahwa media pembelajaran memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran.

Seringkali dijumpai bahwa antara sumber belajar, media, alat peraga memiliki pengertian yang berbeda sama sekali, yang seakan-akan ada pembatas yang sangat ketat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa sumber belajar, media, alat peraga memiliki fungsi yang berbeda. Artinya perbedaan itu dikarenakan fungsi benda/barang itu sendiri. Benda/barang itu bisa berfungsi sebagai sumber belajar, karena dari benda/barang itu memberi informasi. Dengan benda/barang yang sama berfungsi sebagai media, karena dari benda/barang itu dapat mengantarkan pesan. Sedang benda/barang itu berfungsi sebagai alat peraga, karena benda/barang itu diperagakan. Sumber dan media pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran karena dapat mempercepat pemahaman/mempermudah proses pembelajaran.

G. UMPAN BALIK

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi sumber dan media pembelajaran?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi sumber dan media pembelajaran?
3. Apa manfaat materi sumber dan media pembelajaran terhadap tugas Bapak/Ibu di sekolah?
4. Setelah Saudara mempelajari modul diatas, apakah yang akan saudara lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

DAFTAR PUSTAKA

Kegiatan Pembelajaran 1

Heekeren, H.R. Van. 1955. *Prehistoric Life In Indonesia*. Djakarta: Soeroengan.

Soejono, R. P. 1976. *Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Praaksara Indonesia*.

Jakarta: Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional.

Soekmono.1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia; Volume 1*.Jakarta: Yayasan Kanisius.

Kegiatan Pembelajaran 2

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*.

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Daulay, Is. 1983. *Penjelajah-PenjelajahTermasyur Dalam Sejarah*. Jakarta:

Penerbit Mutiara.

Nugroho, Wahyu dan Syachrial Ariffiantono. 2005. *Pengaruh Perdagangan dan Pelayaran Kuno*. Malang: Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang.

Sardiman,AM.TanpaTahun. *Perkembangan Pelayaran dan Perdagangan Dunia Sampai Abad XVI*. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Sayono, Joko. 2004. *Perdagangan dan Pelayaran Kuno serta Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia*. Makalah.

Poesponegoro, Marwati Djoened (dkk). 1994. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Jakarta. Balai Pustaka.

<http://id.wikipedia.org>, online, diakses pada tanggal 15 Nopember 2015

<http://amnanfaza.blogspot.com/>, online, diakses pada tanggal 15 Nopember 2015

Kegiatan Pembelajaran 3

- David Charles Anderson, 2003: *Peristiwa Madiun 1948, Kudeta atau Konflik Internal Tentara?*. Yogyakarta: Media Pressindo
- George Kahin, 1996: *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Harold Crouch, 1999: *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ide Anak Agung Gde Agung, 1991: *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Lev Daniel S, 1967: *The Political Role of the Army in Indonesia*. San Fransisco: Chander Publishing Company.
- Miriam Budiardjo, 1996: *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M.C Ricklefs, 1991: *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- M.C Ricklefs, 2005: *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Mohammad Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho Notosusanto, 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nyoman Dekker, 1980. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Panitia Konferensi Internasional, 1997: *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, (suatu kumpulan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirjo, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sayidiman Suryohadiprojo, 1996: *Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- R. Ambarman, 1980. *Politik Dunia dan Perang Kemerdekaan*. Bandung: Alumni.
- Ulf Sundhaussen, 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Yahya A. Muhaimin, 2002: *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Kegiatan Pembelajaran 4

- Ahmad Syafii Maarif, 2003. *Benedetto Croce dan Gagasannya Tentang Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah
- Herbert Feith, 1995. *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Harold Crouch, 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kerstin Beise, 2004. *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Todiruan Dydo, 1989. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Lev Daniel S, 1967. *The Political Role of the Army in Indonesia*. San Fransisco: Chander Publishing Company.
- Miriam Budiardjo, 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M.C Ricklefs, 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Mohammad Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho Notosusanto, 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Priyo Budi Santoso, 1995. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sekretaris Negara RI, 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- Herbert Feith, 1995: *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sartono Kartodirjo, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soegiarso Soerojo, 1988. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Jakarta: Sri Murni
- Yahya A. Muhaimin, 2002. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Kegiatan Pembelajaran 5

Puspendik, 2014, *Materi Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014 Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK*. Jakarta : BPSDMPK dan PMP.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Permendikbud No 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Pembelajaran 6

- AECT. 1977. *The Definition of Educational Technology*, Edisi Indonesia. Jakarta: CV Rajawali dan Pustekom.
- Lasmono, Suharto. 2003. *Pedoman Pemanfaatan Program Media Pembelajaran. Malang* : Pustekom.
- Poerwono, Harry A dan Ariani. 2003. *Sumber dan Media Pembelajaran*. Malang: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Sadiman, Arief S. dkk. 1986. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekom dan CV Rajawali.
- Setyosari, Punaji dan Sihkabuden. 2005. *Media Pembelajaran*. Malang : Elang Mas.
- Sudjarwo (ed.). 1989. *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta: Mediatama Sarana Perkasa.
- Zainuri dan Soewoko. 1997. *Sumber dan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abdul Gafur. Dr. M.Sc. (2002): *Media Strategi dan Media Pembelajaran PPKn*, Dalam Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn Direktorat SLTP Jakarta.
- Azhar Arsyad, M.A. *Media Pembelajaran*. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamalik Oemar; (1994): *Media Pendidikan*; Cetakan ke 7, Penerbit PT Cetra Aditya Bakti, Bandung.
- Husnan M. Dkk (1993): *Sumber Belajar dan Alat Peraga*, Depdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar, Jakarta.
- Nana Sudjana. Dr. dan Ahmad Rivai, Drs; (1990): *Media Pengajaran*, Penerbit Sinar Baru Bandung bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pengajaran dan Peminjaman Ilmu Lemlit IKIP Bandung.
- Sudjana, Nana dan Rivai Ahmad; (1989): *Teknologi Pengajaran*; Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Zainuri, Drs. Dan Endang Rohayati. Dra; (1996/1997): *Sumber dan Media Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bahan Penataran untuk Guru Sekolah Menengah Umum, Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang.



PPPPTK Pkn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id